

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK KEMENTERIAN PERTANIAN RI

20 JUNI 2024

-Biro Humas dan Informasi Publik-

Tittle	HARGA CABAI RAWIT MASIH TINGGI DI PALU	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	Antara/Basri Marzuki	



HARGA CABAI RAWIT MASIH TINGGI DI PALU
Pedagang membersihkan cabai rawit untuk dijual di Pasar Induk Manonda, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/6). Meskipun lebaran Idul Adha telah berlalu, namun harga cabai rawit tetap tinggi di wilayah itu di kisaran 80 ribu rupiah sampai 90 ribu rupiah per kilogram yang disebabkan kurangnya pasokan ke pasar.

ANTARA/BASRI MARZUKI

Tittle	Menanam Bibit Padi	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	8	
Author	Antara/M Risyal Hidayat	

» Menanam Bibit Padi



ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

» WBuruh tani menanam bibit padi varietas Inpari 32 di areal persawahan Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (19/6). Menanam sepertinya bukan mundur seperti di Yogyakarta dan Jateng, tapi menyamping. Sudin Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakut membagikan 3,5 ton bibit padi varietas Inpari 32 kepada delapan kelompok tani.

Title	Flu Burung Tunjukkan Dunia Belum Siap Hadapi Pandemi di Masa Depan	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	SB/N-3	

Penyebaran Penyakit

Flu Burung Tunjukkan Dunia Belum Siap Hadapi Pandemi di Masa Depan

PARIS - Sebuah laporan mengungkapkan meningkatnya kasus flu burung di kalangan mamalia, termasuk sapi, memberikan peringatan keras dunia belum siap untuk mencegah pandemi di masa depan. Laporan itu mendesak para pemimpin untuk bertindak cepat.

"Lebih dari empat tahun sejak dimulainya pandemi Covid-19, para politisi berjudi karena kelalaian dengan tidak memberikan cukup uang atau upaya untuk menghindari terulangnya bencana tersebut," bunyi laporan itu, Selasa (18/6).

Flu burung H5N1 semakin menular ke mamalia, termasuk sapi di peternakan di seluruh Amerika Serikat, serta beberapa manusia, sehingga

menimbulkan kekhawatiran virus ini dapat memicu pandemi di masa depan.

"Jika H5N1 mulai menyebar dari orang ke orang, dunia mungkin akan kembali kewalahan," kata rekan penulis laporan itu dan mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Helen Clark, pada konferensi pers.

Dikutip dari *The Straits Times*, laporan ini juga menyebutkan pandemi berikut bahkan bisa menjadi potensi bencana yang lebih besar daripada Covid-19.

"Kami tidak mempunyai cukup perlengkapan untuk menghentikan wabah ini sebelum menyebar lebih jauh," katanya, juga menunjuk pada jenis virus *mpox* yang lebih mematikan, khususnya yang

menyerang anak-anak di Republik Demokratik Kongo.

Meskipun negara-negara kaya memiliki vaksin yang dapat melawan wabah *mpox* ini, vaksin itu belum tersedia di negara Afrika tengah tersebut.

Penyebaran Patogen

Kini, dua orang telah meninggal karena jenis *mpox* di Afrika Selatan, yang menggambarkan bagaimana kelalaian dapat menyebabkan penyebaran patogen tersebut.

Laporan ini dipimpin oleh Clark dan mantan presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua bersama panel independen yang memberi nasihat kepada Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health

Organisation (WHO) mengenai kesiapsiagaan pandemi.

"Meskipun ada saran dari panel pada tahun 2021, dana yang tersedia saat ini tidak seberapa dibandingkan dengan kebutuhan, dan negara-negara berpendapatan tinggi terlalu berpegang teguh pada pendekatan tradisional berbasis amal terhadap keadilan," kata Clark.

Laporan tersebut menunjukkan para anggota WHO masih belum mencapai kesepakatan mengenai pandemi yang banyak dibicarakan, terutama karena perbedaan pendapat antara negara-negara kaya dan negara-negara yang merasa terpinggirkan selama krisis Covid-19.

■ SB/N-3

Tittle	Bali Fokus Komoditas Cabai	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	18	
Author	Harian Noris Saputra	

| PENGENDALIAN INFLASI |

Bali Fokus Komoditas Cabai

Bisnis, DENPASAR — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali tengah fokus pada komoditas bergejolak (*volatile food*) untuk meracik strategi pengendalian sesuai dengan sasaran, terutama pada komoditas cabai.

TPID memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng untuk ditanami 12.000 bibit cabai varietas lokal dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Bali.

Kini, TPID telah melakukan panen sebanyak 500 kilogram (kg) cabai dari lahan tersebut.

Kepala KPw BI Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan bahwa dengan bibit cabai unggul varietas lokal yang diberikan oleh Bank Indonesia, diperkirakan tanaman cabai dapat mencapai 18 kali panen dengan total mencapai 20 ton selama masa tanam.

“Selanjutnya hasil panen

cabai tersebut akan diserap oleh Perumda Pasar Argha Nayottama untuk dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasar dalam rangka pengendalian inflasi cabai di Buleleng,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (19/6).

Dia mengungkapkan bahwa hasil penjualan cabai ini akan diberikan kepada kelompok tani dan petugas kebersihan kabupaten yang juga membantu dalam mengelola area lahan perkotaan.

Tidak hanya bibit, KPw BI Bali juga memberikan bantuan teknis berupa pembuatan pupuk dan fungisida organik kepada kelompok tani Sudhamala Asri yang mengolah lahan tersebut.

Erwin mengatakan bahwa gerakan tanam dan panen cabai bersama merupakan upaya untuk meningkatkan produksi cabai sehingga mam-

pu menekan laju inflasi di Bali.

Selain itu, imbuhnya, kegiatan ini juga untuk mempromosikan *urban farming* dengan memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah daerah.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengungkapkan bahwa pada Mei 2024, Kabupaten Buleleng mengalami deflasi yang cukup dalam, yakni 0,33% secara bulanan (*month-to-month/MtM*).

Wilayah ini, imbuhnya, juga mengalami inflasi sebesar 2,92% secara tahunan (*year-on-year/YoY*). “Dengan semangat ngrombo, kita bersama-sama harus menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.”

Tidak hanya cabai, pada lahan tersebut juga dimanfaatkan untuk komoditas lainnya sebagai *integrated farming*, seperti sayuran dan buah-buahan (*Harian Noris Saputra*)

Title	IMPOR BERAS MELONJAK	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	5	
Author	Dwi Rachmawati	

| BAHAN PANGAN |

IMPOR BERAS MELONJAK

Bisnis, JAKARTA — Badan Pusat Statistik mengungkapkan nilai impor beras selama 5 bulan pertama tahun ini telah menembus US\$1,44 miliar atau setara dengan Rp23,56 triliun atau melonjak 224,26% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.

Dwi Rachmawati
redaksi@bisnis.com

Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) M. Habibullah menyatakan nilai impor beras pada Januari—Mei 2023 sekitar US\$446,6 juta atau setara Rp7,31 triliun.

Menurutnya, lonjakan nilai impor komoditas pangan utama itu terjadi sejalan dengan peningkatan realisasi impor beras pada periode Januari—Mei 2024 sebesar 165,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 2,26 juta ton.

“Impor beras naik sebesar 165,27% dibandingkan Januari—Mei 2023,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/6).

Secara terperinci, total volume impor beras selama periode 5 bulan 2024 sebanyak 2,26 juta ton didominasi impor beras dari Thailand sebanyak 918.901 ton.

Negara lain yang memasok beras impor ke Indonesia pada periode tersebut yaitu Vietnam sebanyak 624.741 ton, Pakistan sebanyak 390.846 ton, India 58.215 ton, dan Kamboja sebanyak 25.000 ton. Sisanya sebanyak 248.461 ton beras diimpor dari negara lainnya.

Habibullah melanjutkan nilai impor beras Indonesia terhadap Thailand sepanjang Januari—Mei 2024 mencapai US\$597,63 juta, sedangkan nilai impor beras dari Vietnam sebesar US\$402,54 juta.

Khusus nilai impor beras dari Pakistan menembus US\$245,9 juta, nilai impor beras dari India sebesar US\$29,89 juta, dan nilai impor beras dari Kamboja tercatat mencapai US\$16,25 juta.

Lonjakan nilai dan volume impor beras sepanjang Januari—Mei 2024 termasuk fenomenal dibandingkan dengan impor komoditas pangan lainnya.

Pada periode Januari—Mei 2024, impor bawang putih justru turun 2,42% dibandingkan periode yang sama 2023. Untuk impor gula pada 5 bulan pertama 2024 juga naik 0,66% dibandingkan dengan Januari—Mei 2023, sedangkan impor daging sejenis lembu justru turun 48,36%.

Sebaliknya, impor komoditas gandum pada Januari—Mei 2024 juga naik sebesar 35,31% dibandingkan dengan Januari—Mei 2023.

Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Pertanian (Kementan) secara terang-terangan mengungkapkan produksi beras nasional anjlok sepanjang 2023.

Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, penurunan produksi beras pada tahun lalu disebabkan, salah satunya akibat persoalan pupuk bersubsidi.

Selain volume pupuk subsidi yang terbatas, aksesibilitas terhadap pupuk subsidi menjadi biang kerok lainnya.

Prihasto menyebutkan ada sekitar 17%—20% petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

Di sisi lain, ada sekitar 30 juta petani masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk subsidi.

Data BPS mencatat, produksi beras pada 2023 sebanyak 31,1 juta ton telah turun 440.000 ton dari produksi beras pada 2022 sebanyak 31,54 juta ton. “Penurunan produksi beras pada 2023 sebesar 0,44 juta ton, salah satu penyebabnya terkait dengan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap pupuk bersubsidi,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (19/6).

Sejumlah upaya telah dilakukan Kementan mengatasi persoalan

pupuk subsidi, di antaranya di-kabulkannya penambahan alokasi subsidi pupuk dari 4,73 juta ton pada 2023, menjadi 9,55 juta ton pada 2024 dengan jumlah petani penerima mencapai 14,2 juta orang. Di sisi lain, Prihasto mengelaim bahwa revisi Permentan No. 10/2022 menjadi solusi tata kelola pupuk yang lebih baik. Dalam beleid teranyar itu, Kementan menambahkan pupuk organik masuk ke dalam jenis pupuk bersubsidi bersama Urea, NPK, NPK khusus.

Dalam aturan terbaru, petani harus tergabung dahulu ke dalam kelompok tani (poktan) dan terdaftar ke dalam e-RDCK yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Adapun, pendanaan petani penerima pupuk kini dievaluasi setiap 4 bulan sekali dari sebelumnya hanya satu kali setahun.

Alokasi pupuk bersubsidi juga dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan sebaran wilayah.

Penetapan alokasi e-RDCK dan rincian alokasi per wilayah dengan mempertimbangkan luas baku sawah dan LP2B. Adapun, untuk jenis komoditas yang berhak mendapat pupuk bersubsidi meliputi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao dan kopi. “Penebusan pupuk subsidi sekarang dapat menggunakan KTP atau Kartu Tani,” tuturnya.

Dalam paparannya, Kementan menyebut penurunan produksi beras juga dipicu sejumlah a.l. anggaran belanja yang turun, bibit unggul yang berkurang, alat dan mesin pertanian (alsintan) yang sudah tua atau memasuki umur



Petani sebagai produsen pangan, tapi juga menerima bantuan pangan.

teknis, kekeringan akibat El Nino, 60% saluran irigasi yang perlu direhabilitasi serta ketersediaan petugas penyuluh pertanian (PPL) yang tidak memadai.

DEFISIT BERAS

Sebaliknya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa ada risiko kekurangan produksi beras pada tahun ini hingga 5 juta ton.

Pada semester II/2024, Arief memproyeksikan produksi beras anjlok seiring dengan defisit produksi beras periode Januari—Juli 2024 sebesar 2,6 juta ton.

“Kalau diskusi saya dengan Pak Menteri Pertanian memproyeksikan sekitar 5 juta ton [kekurangan produksi beras]. Dilihat dari grafik dan *pattern* di semester kedua memang agak berat produksinya,” ujar Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Senin (10/6).

Arief belum bisa berspekulasi ihwal potensi tambahan kuota impor beras tahun ini. Adapun,

pemerintah sebelumnya telah menetapkan impor beras pada 2024 sebanyak 3,6 juta ton.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebutkan realisasi impor beras sudah mencapai 2 juta ton dari penugasan 3,6 juta ton tahun ini.

Sebagian besar beras impor datang dari Vietnam, Thailand, sama Pakistan.

Untuk pengadaan beras impor, dia tidak bisa menerapkan sistem *hedging* harga dengan para pemasok. Namun, dia memastikan telah menjalin komitmen untuk pengadaan beras impor melalui kontrak dengan pihak di negara sumber impor apabila sewaktu-waktu beras diperlukan.

“Harga *market*, saya enggak bisa *hedging* aturannya enggak boleh,” ungkapnya.

Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menyebutkan bantuan pangan beras atau bansos beras tidak menjawab persoalan krisis beras di dalam negeri secara tuntas.

Menurutnya, hampir 54% rumah tangga penduduk miskin di Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Artinya, banyak di antara penerima bansos beras selama ini adalah dari kalangan petani.

“Petani sebagai produsen pangan, tapi juga menerima bantuan pangan. Sebuah ironi,” ujar Eliza.

Selama ini, pemerintah memiliki skema bansos khusus pangan yaitu bantuan pangan non tunai (BPNT) yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos). ■

Impor beras di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan program bantuan sosial pangan berupa beras. Rencananya, program bansos pangan beras berlanjut pada 2025 yang membawa konsekuensi naiknya volume impor beras pada tahun depan.

Harga Rata-rata Beras Premium Secara Bulanan di Pedagang Eceran (Rp/kg)

Periode	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
2024	15.110	15.900	16.450	15.990	15.560	15.460	-	-	-	-	-	-
2023	13.140	13.410	13.530	13.620	13.590	13.570	13.580	13.730	14.470	14.890	14.980	14.990
2022	12.350	12.310	12.350	12.350	12.320	12.280	12.250	12.310	12.480	12.630	12.700	12.910

Produksi, Kebutuhan dan Realisasi Impor Beras 2018-2025 (juta ton)



Sumber: Perbasan No.5/2024, Perbasan No.4/2024, Kementan, Bapanas, Juni 2024, dilisai

** proyeksi BPS dan Kementan - **

BISNIS/RADITYO EKO



Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras di Indonesia per 5 Juni 2024 (Rp/kg)

Wilayah	Beras Medium	Beras Premium
Jawa, Lampung, dan Sumsel	12.500	14.900
Aceh, Sumatra non-Lampung dan Sumsel	13.100	15.400
Bali dan NTB	12.500	14.900
NTT	13.100	15.400
Sulawesi	12.500	14.900
Kalimantan	13.100	15.400
Maluku	13.500	15.800
Papua	13.500	15.800

Title	Jejak ANJT Pacu Keberlanjutan	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	13	
Author	Ana Noviani	

Jejak ANJT Pacu Keberlanjutan

Ana Noviani
ana.noviani@bisnis.com

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) terus memacu implementasi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam strategi bisnisnya di tengah persepsi miring terhadap industri perkebunan sawit sebagai aktivitas bisnis penyumbang emisi karbon dan deforestasi. Pada 2025, ANJT menargetkan 100% plasma dan kemitraan telah tersertifikasi RSPO/ISPO.

Hingga akhir 2023, ANJT mencatat sejumlah kemajuan dalam integrasi inisiatif *environmental, social, and governance* (ESG) dengan strategi bisnis perseroan. Di bidang lingkungan, misalnya, produsen *crude palm oil* (CPO) itu terus mendorong sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) maupun Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Dalam Laporan Keberlanjutan 2023, ANJT mencatat 86% sertifikasi plasma dan kemitraan RSPO/ISPO. Direktur Utama Austindo Nusantara Jaya Lucas Kurniawan menyebut realisasi tersebut menempatkan ANJT di jalur yang tepat untuk mencapai target 100% pada 2025.

“Kami juga menerapkan sistem ketertelusuran elektronik eTIS di 100% operasi kelapa sawit dan pemasok kami,” ungkapnya dalam laporan yang dikutip Rabu (19/6).

Pencapaian lainnya ialah mengurangi intensitas penggunaan air hingga di bawah 1 ton untuk setiap ton tandan buah segar (TBS) yang dipanen. Pada 2023, imbuhan Lucas, ANJT mampu menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 83,8% dari *baseline*. Menurut Lucas realisasi itu kian mendekatkan ANJT pada

target mencapai emisi nol bersih pada 2030.

Pada 2023, emisi GRK bersih ANJT sebesar 226.219 ton CO₂ *equivalent* atau lebih rendah dari 274.970 ton CO₂ eq pada 2022. Adapun, intensitas emisi GRK bersih untuk minyak sawit turun dari 0,77 ton CO₂ eq per ton CPO menjadi 0,66 ton CO₂ eq per ton CPO.

Lebih terperinci, kontributor penurunan emisi GRK perseroan yang memiliki area tertanam seluas 53.600 hektare itu a.l. *electrostatic precipitator* di PT Kayung Agro Lestari (KAL), selesainya pemasangan panel surya di atap pabrik PT Gading Mas Indonesia Teguh (GMIT), serta dampak positif yang signifikan dari keputusan ANJT untuk mempertahankan kawasan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati yang luas di Papua Barat Daya.

Panel surya di GMIT menghasilkan pengurangan emisi GRK dari pabrik sebesar 19% pada tahun pertama. Tahun ini, ANJT berambisi meningkatkan portofolio energi terbarukan menjadi 43% atau mendekati target sebesar 60% pada 2025.

ANJT juga melaporkan hampir menyelesaikan sistem pencegahan kebakaran dan peringatan dini. Pada Desember 2023, tim pengembangan telah menyelesaikan pembangunan waduk sehingga sistem dapat berfungsi dengan kapasitas penuh. Elemen terakhir yang perlu dirampungkan ialah pemasangan pelindung pipa untuk memastikan ketahanan.

“Untuk memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan, kami mengintegrasikan insiatif ESG untuk selalu berdampingan dengan strategi bisnis. Komitmen tersebut didasari oleh visi,

misi, dan nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi keseimbangan antara aspek manusia, planet, dan kemakmuran,” jelas Lucas dalam keterangan resmi, baru-baru ini.

Progres positif implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dan ESG membuahkan apresiasi terhadap ANJT, termasuk peningkatan ESG *rating*.

Pada 2023, Sustainalytics memberikan penilaian risiko rendah untuk ANJT dengan skor 15,4 atau lebih rendah 2,9 poin dibanding hasil pemeringkatan sebelumnya 18,3. Skor lebih baik yang diberikan oleh lembaga riset dan pemeringkat ESG dan tata kelola perusahaan Morningstar itu berimbas pada peringkat ANJT di antara perusahaan sejenis di level global.

“Pencapaian ini menempatkan ANJ pada peringkat pertama di antara perusahaan pertanian global. Pencapaian ini juga meningkatkan peringkat ANJ dari peringkat kesepuluh pada 2022 menjadi peringkat ketiga pada 2023 untuk sektor industri produk makanan global, yang dinilai oleh Sustainalytics,” paparnya.

Skor SPOTT—sebuah platform transparansi global untuk industri kelapa sawit—ANJT juga meningkat menjadi 93,3% dari 91,1% pada 2022. Skor tersebut menempatkan ANJT di peringkat kelima secara global. Untuk aspek tata kelola perusahaan, ANJT meraih skor 100,27 atau level 5 (> 100,00) dari ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Strategi memacu ESG diyakini ANJT dapat menjaga tren pertumbuhan dan ketangguhan perusahaan di tengah lingkungan ekonomi global yang tidak dapat diprediksi.

Title	TINJAU BANTUAN POMPA AIR	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	3	
Author	Muchlis Jr	

■ TINJAU BANTUAN POMPA AIR



BPMI Setpres/Muchlis Jr

Presiden Joko Widodo meninjau pompa air untuk pengairan sawah di Tumpukan, Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (19/6). Dalam kunjungan kerjanya, Presiden memastikan fungsi pompa air bantuan dari Kementan untuk pengairan sawah berfungsi dengan baik sehingga dapat mengantisipasi kesulitan air saat musim kemarau.

Title	Awas, Urusan Migor Bikin Inflasi Pangan Meroket	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	DIR	

Harga Minyakita Diusulkan Naik Jadi Rp 15.500

Awas, Urusan Migor Bikin Inflasi Pangan Meroket

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita menjadi Rp 15.500 per liter. Kenaikan minyak goreng (migor) untuk rakyat itu dikhawatirkan membebani masyarakat kecil dan inflasi pangan bisa meroket.

MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan kenaikan harga untuk Minyakita sebesar Rp 1.500 per liter atau menjadi Rp 15.500 per liter. Adapun HET Minyakita saat ini Rp 14.000 per liter.

"Kami usulkan (Minyakita) naik Rp 1.500 karena di pasar beras saja naik dari Rp 10.900 per kilogram (kg) menjadi Rp 12.500 per kilogram. Jadi, naiknya Rp 1.600 per kilogram, itu beras," kata pria yang biasa disapa Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024).

Karena itu, menurut Zulhas,

harga Minyakita juga sudah saatnya dinaikkan.

"Nanti kalau kita boleh mengusulkan sendiri, ya sudah kita putuskan saja," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan, Kemendag tengah berdiskusi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait usulan tersebut.

Namun, dia tidak dapat memastikan berlakunya HET terbaru Minyakita. Pasalnya, untuk mengubah HET Minyakita, pihaknya perlu melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun

2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat terlebih dahulu.

"Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik," kata Isy.

Isy mengaku perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan HET Minyakita, seperti inflasi dan harga *Crude Palm Oil* (CPO). Pertimbangan inflasi berkaitan dengan daya beli masyarakat.

Hal ini dilakukan agar kenaikan HET Minyakita juga tidak berdampak pada kenaikan harga pangan lainnya.

Selain itu, Kemendag juga akan mempertimbangkan level harga di produsen agar tetap mendapatkan keuntungan.

Dalam hal ini, Isy menyebut ada beberapa komponen dalam perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP), yakni harga minyak kelapa sawit, ongkos

biaya angkut pabrik, biaya pengemasan dan pengolahan hingga biaya distribusi.

Selain itu, dia menekankan bakal memantau terus pergerakan harga CPO sebagai bahan baku Minyakita. Isy bilang, tren harga CPO terus mengalami kenaikan.

"Harga CPO 2024 sudah Rp 12.295, pas kita hitung pertama tahun 2022 Rp 11.200. Lalu tahun sebelumnya Rp 10.000. Jadi, memang sudah ada kenaikan," jelasnya.

Analisis kebijakan pangan Syaiful Bahari menilai, kenaikan HET Minyakita dipastikan membebani masyarakat. Selain itu, kenaikan Minyakita bisa mempertinggi inflasi pangan yang saat ini sudah terbebani dengan kenaikan bahan pokok lainnya seperti beras.

"Ini justru kontradiktif dengan

upaya Pemerintah ingin menurunkan angka inflasi. Kalau HET Minyakita naik, sudah pasti akan mendorong harga minyak goreng di pasar retail yang bukan Minyakita makin ikut-ikutan naik," tegas Syaiful.

Mestinya, kata dia, dengan produksi CPO nasional yang surplus, Pemerintah menggunakan minyak goreng sebagai peredam inflasi. Bukan justru malah menambah beban inflasi pangan.

Menurutnya, Pemerintah tidak perlu menaikkan HET Minyakita. Sebab, sampai saat ini produksi sawit dan CPO nasional tetap surplus, bahkan produksi CPO di 2023 meningkat 7,15 persen mencapai 50,07 juta ton.

Sedangkan konsumsi minyak sawit di tahun yang sama sebesar 23,13 juta ton, itu pun sudah termasuk untuk program biodiesel. ■ DIR

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	CEK POMPANISASI	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1	
Author	Rakyat Merdeka	



CEK POMPANISASI: Presiden Joko Widodo meninjau langsung implementasi pompanisasi di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (19/06/2024). Presiden mengungkapkan, pemerintah telah memulai distribusi pompa air ke seluruh provinsi untuk memastikan produktivitas pertanian tetap stabil.

Title	Jokowi Siaga Kekeringan	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1 Part 1	
Author	BCG	

Jokowi Siaga Kekeringan

ANTISIPASI cuaca ekstrem dan masuknya musim kemarau, Presiden Jokowi mulai siaga kekeringan. Kemarin, mantan Wali Kota Solo itu meninjau program pompanisasi di Dukuh Sangiran, Desa Krendowahono, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan pompanisasi ini, Jokowi berharap, produksi pangan tetap meningkat meski di musim kemarau.

Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 10.15 WIB pagi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampil dengan setelan khasnya, kemeja lengan panjang yang digulung sesiku, celana hitam, dan sepatu kets. Dalam kesempatan ini, Kepala Negara didampingi

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Tiba di lokasi, Jokowi langsung menyusuri pematang sawah, melihat secara langsung pemberian bantuan pompa air untuk pengairan sawah dan pertanian atau pompanisasi. Jokowi melihat dari dekat pompa air yang dipasang di sungai.

Dari sana, Jokowi memeriksa air hasil pompa yang dialirkan dari sungai ke sawah penduduk. Di salah satu momen, Jokowi jongkok dan menciduk air yang keluar dari pipa dengan tangannya.

Setelah itu, Jokowi memberikan keterangan pers. Kepada wartawan, Jokowi mengatakan, pompanisasi ini bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi potensi kekeringan yang akan berlangsung dari Juli hingga Oktober sebagaimana prediksi BMKG.



VERSI
DIGITAL
ARTIKEL INI,
SILAKAN
SCAN QR
CODE

◆ BERSAMBUNG KE HAL 7

Title	Jokowi Siaga Kekeringan	
Date	20 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1 Part 2	
Author	BCG	

Jokowi Siaga Kekeringan

... DARI HALAMAN 1

“Pompanisasi ini tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Karanganyar saja, tetapi di semua provinsi yang kita perkirakan nanti di bulan Juli, Agustus, September, Oktober ini akan terjadi kekeringan yang panjang,” kata Jokowi.

Dengan adanya bantuan pompa air, Jokowi menargetkan, peningkatan produksi padi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,3 juta ton. Di Provinsi Jateng, Pemerintah menyalurkan 4.300 pompa air yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

Proyek pompanisasi ini melibatkan pengambilan air dari sungai dan air tanah untuk mendukung irigasi di musim kering. Presiden juga menyatakan, hujan buatan akan dimaksimalkan di akhir musim hujan untuk mendukung upaya ini.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, strategi pemerintah untuk mengatasi dampak El Nino dan kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung lebih awal. Menurutnya, pompanisasi merupakan langkah konkret yang cepat dalam memitigasi dampak kekeringan.

“Kenapa kita pasang pompa air? Karena ini adalah solusi cepat. Hari ini kita pompa, hari ini kita bisa tanam karena kalau kita cetak sawah itu butuh waktu,” ujar Amran.

Amran melanjutkan, upaya ini diharapkan tidak hanya akan mengatasi kekurangan pasokan air di musim kering, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman, sehingga membantu meningkatkan

kesejahteraan para petani.

Pemerintah menargetkan, pompanisasi ini dapat menjangkau 1 juta hektare lahan pertanian dan berencana untuk mencetak sawah baru seluas 1 juta hektare per tahun sebagai strategi jangka panjang. Ini merupakan bagian dari usaha besar untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia di masa depan.

“Harapan kita ke depan, mari kita sinergi, mari kita kolaborasi untuk negeri yang kita cintai. Karena mimpi besar kita adalah mencukupi beras dalam negeri, bahkan syukur-syukur ke depan bisa kita memberi, membantu saudara-saudara kita yang kelaparan kepada negara lain,” tutup Menteri Pertanian.

Selain meninjau pompanisasi di Kabupaten Karanganyar, Presiden Jokowi juga meninjau proyek serupa di Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten serta Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.

Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengungkapkan, kekeringan akan mendominasi di sejumlah daerah hingga September 2024.

Berdasarkan data yang dihimpun BMKG, terdapat sejumlah daerah yang mengalami curah hujan sangat rendah, yakni kurang dari 50 milimeter per bulan.

“Prediksi curah hujan dan hujan bulanan menunjukkan bahwa kondisi kekeringan selama musim kemarau akan mendominasi hingga September,” kata Dwikorita. ■ **BCG**

Title	Neraca Perdagangan Surplus Rp 47,9 Triliun	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	NOV	

Catatan BPS

Neraca Perdagangan Surplus Rp 47,9 Triliun

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia kembali surplus 2,93 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 47,9 triliun (kurs Rp 16.364 per dolar AS) pada Mei 2024. Surplus ini lebih tinggi bila dibandingkan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan, surplus terjadi karena nilai ekspor Indonesia

pada Mei 2024 mencapai 22,33 miliar dolar AS. Nilai impor Indonesia di Mei 2024 mencapai 19,40 miliar, sehingga ada surplus 2,93 miliar dolar.

"Nilai ekspor 22,33 miliar dolar AS pada Mei 2024 naik 13,82 persen dibandingkan ekspor April 2024, atau naik 2,86 persen dibandingkan Mei 2023," kata Habibullah dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Surplus neraca perdagangan ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas dan gas (migas) sebesar 4,26 miliar dolar AS.

Komoditas penyumbang surplus, yakni bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan atau nabati (HS 15), besi dan baja (HS 72).

"Surplus neraca perdagangan nonmigas Mei 2024 lebih rendah jika dibandingkan bulan lalu.

Namun lebih tinggi dibandingkan Mei 2023," ungkapnya.

Sementara, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit sebesar 1,33 miliar dolar AS. Komoditas penyumbang utama defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah.

Defisit neraca perdagangan migas ini juga lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai defisit 1,63 miliar dolar AS dan bulan sama tahun lalu

sebesar 1,83 miliar dolar AS.

Habibullah mengatakan, ada tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia, yaitu China, AS dan India. Nilai ekspor ke tiga negara ini memberikan andil sekitar 42,39 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Mei 2024.

Nilai ekspor nonmigas ke China tercatat 4,73 miliar dolar AS atau naik 10,59 persen dibandingkan April 2024. ■ NOV

Title	Pompanisasi Perlu Infrastruktur Pelengkap
Date	20 Juni 2024
Media	Media Indonesia
Page	7
Author	Widjajadi



Kementerian Pertanian



ANTARA/ALYSIUS JAROT NUGROHO

POMPA AIR UNTUK PENGAIRAN SAWAH: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) meninjau pompa air untuk pengairan sawah di Tumpukan, Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, kemarin. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden memastikan fungsi pompa air bantuan dari Kementan untuk pengairan sawah berfungsi dengan baik sehingga dapat mengantisipasi kesulitan air saat musim kemarau.

Pompanisasi Perlu Infrastruktur Pelengkap

Infrastruktur tampungan air kurang memadai dan mengakibatkan minimnya air yang tertampung pada musim hujan.

WIDJAJADI
widjajadi@mediaindonesia.com

KEBIJAKAN pompanisasi untuk mengairi lahan pertanian pada musim kemarau tidak dapat berdiri sendiri. Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono saat merespons gencarnya pompanisasi yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengatasi kekeringan.

Menurutnya, pompanisasi bisa efektif apabila sumber-sumber air seperti saluran irigasi, sungai, sumur, hingga waduk dan situ dalam kondisi cukup.

Namun, masalah yang se-

ring ditemui ialah infrastruktur tampungan air tersebut kurang memadai dan mengakibatkan minimnya air yang tertampung pada musim hujan. Hal itu pun berujung menimbulkan dua bencana, yakni kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan.

Lebih lanjut politikus PDI Perjuangan itu mengatakan sudah banyak asosiasi petani yang menyampaikan aspirasi untuk membangun embung serta dilakukannya normalisasi saluran.

"Dilakukan normalisasi. Pemerintah harus koordinasi bukan hanya dengan Kementan, tapi juga dengan (Kementerian) PU-Pera, balai-balai sungai, sehingga

menurut saya pompanisasi yang paling utama adalah airnya ada dulu. Saat bicara petani yang mayoritas sudah punya pompa air, yang mereka butuhkan saat ini normalisasi saluran," jelas Ono saat rapat kerja bersama Kementan, kemarin.

Produktivitas naik

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo optimistis Indonesia tetap mampu menaikkan produktivitas di tengah ancaman kekeringan. Ia menargetkan bantuan pompa dapat disalurkan ke berbagai daerah yang terancam kekeringan agar mampu menggenjot produktivitas.

Menurut Jokowi, dengan pompanisasi tersebut, target produksi padi tahun ini yang semula 9,8 juta ton diharapkan bisa bertambah sebesar 1,3 juta ton.

"Memang tidak banyak, ha-

nya penambahan 1,3 juta ton," kata Presiden saat mengecek kondisi sawah tadah hujan di Dukuh Ngrawan, Dusun Sangiran, Desa Krendowahono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, kemarin.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) Banyumas pun turut mengoptimalkan 71 unit pompa air bantuan pemerintah pusat untuk mengairi area persawahan yang berpotensi terdampak kekeringan.

"Sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak kekurangan air pada musim kemarau, telah ada program pompanisasi lahan pertanian secara nasional. Banyumas mendapatkan bantuan 37 unit pompa air dari Kementan dan telah didistribusikan ke kelompok tani. Selain itu, Kementan juga memberikan bantuan 34 unit pompa air

untuk dikelola oleh Dinpertan KP Banyumas dan Kodim 0701 Banyumas," kata Kepala Dinpertan KP Kabupaten Banyumas Jaka Budi Santosa.

Menurutnya, pompa air akan dimaksimalkan untuk mengairi wilayah-wilayah yang memiliki mata air atau sumber air permukaan seperti sungai dan embung.

Modifikasi cuaca

Di sisi lain, penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC) dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, membuahkan hasil.

Dengan teknologi hujan buatan itu, beberapa wilayah di Lamongan turun hujan beberapa kali. Dengan demikian, tanaman pangan yang semula terancam puso pun terselamatkan.

"Iya, beberapa kali di sejumlah wilayah turun hujan sehingga tanaman pangan kembali segar," kata juru bicara Pemkab Lamongan Sugeng Widodo.

Menurut Sugeng, hujan turun setelah TMC dilaksanakan sejak 10 Juni lalu. Meski tidak lebat, hujan yang turun diharapkan mampu menyelamatkan tanaman pangan yang terancam kekeringan. (Fal/JS/LD/YK/J-3)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Produksi Beras Anjlok 440.000 Ton pada 2023	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	6	
Author	Fal/E-2	

Produksi Beras Anjlok 440.000 Ton pada 2023

KEMENTERIAN Pertanian mengakui adanya penurunan produktivitas beras hingga 440.000 ton pada 2023. Hal itu disebabkan oleh persoalan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap pupuk bersubsidi.

“Pertama, volume pupuk bersubsidi yang terus dikurangi dan pada tahun 2024 hanya tinggal 50% dibandingkan tahun 2018,” ucap Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto Setyanto saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV

DPR, kemarin.

Kedua, sambungnya, tercatat sebanyak 17%-20% petani tidak dapat menggunakan kartu taninya untuk menebus pupuk. Permasalahan lainnya, petani hanya diberi pupuk bersubsidi untuk satu kali tanam.

“Keempat, sekitar 30 juta petani anggota lembaga masyarakat desa hutan tidak menerima pupuk,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi

beras pada 2023 mencapai 31,1 juta ton, turun 440.000 ton dari produksi beras pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton.

Untuk mengatasi permasalahan pupuk itu, pemerintah saat ini telah menambah alokasi pupuk bersubsidi, dari 4,73 juta ton pada 2023 menjadi 9,5 juta pada 2024, dengan jumlah penerima mencapai 14,2 juta petani.

Pemerintah juga merevisi Permentan No 10/2022 men-

jadi Permentan No 1/2024 agar tata kelola pupuk jadi lebih baik. Dalam beleid teranyar itu, Kementan menambah pupuk organik masuk ke dalam jenis pupuk bersubsidi bersama Urea, NPK, NPK khusus.

Selain itu, dalam aturan terbaru, petani harus tergabung dahulu ke dalam kelompok tani (poktan) dan terdaftar ke dalam e-RDCK yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

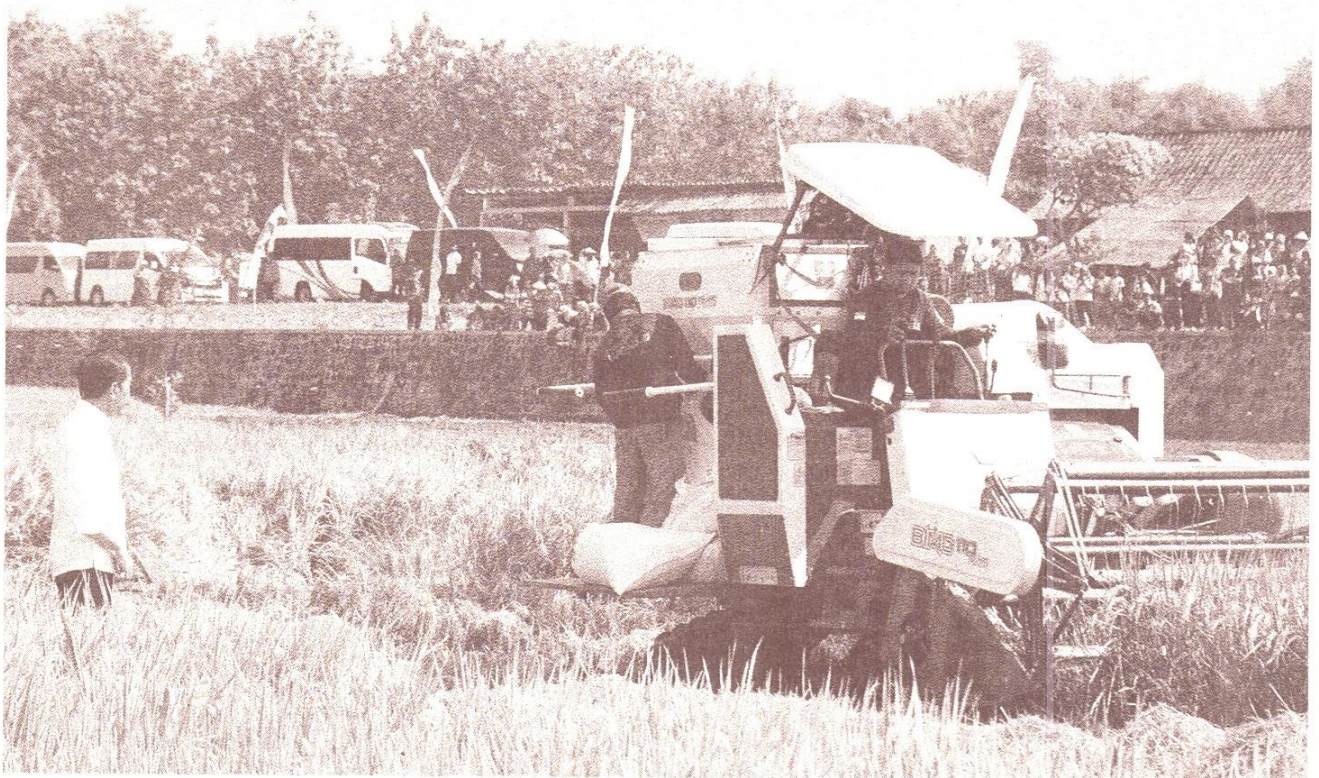
Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat Guntur Sasono mengkritik langkah perbaikan pemerintah namun tetap saja kurang berpengaruh pada peningkatan produksi.

“Karena sifatnya hanya regulasi tambal sulam yang sangat rutinitas,” tuturnya.

Ia menyarankan agar segera dibentuk panitia kerja (panja) untuk memperbaiki kebijakan pupuk tersebut agar bisa terrealisasi dengan baik. (Fal/E-2)

Title	Presiden Joko Widodo Tinjau Program Pompanisasi di Karanganyar	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	10	
Author	Kompas/Nino Citra Anugrahanto	

Presiden Joko Widodo Tinjau Program Pompanisasi di Karanganyar



KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Presiden Joko Widodo menyaksikan petani memanen sawahnya sewaktu meninjau program pemberian bantuan pompa air (pompanisasi) untuk pengairan sawah di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangsari, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2024). Pompanisasi dijadikan upaya mencegah kekeringan panjang. Diharapkan, langkah itu meningkatkan produksi beras.

Title	Stagnasi Penurunan Stunting
Date	20 Juni 2024
Media	Koran Kontan
Page	15
Author	Khudori



Kementerian Pertanian

Stagnasi Penurunan Stunting

Sejak semula, target duet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurunkan prevalensi *stunting* (tengkes) dari 30,8% pada 2018 tinggal 14% pada 2024 dinilai amat ambisius. Seperti kemiskinan, kian kecil persentase kian rumit dan struktural masalahnya, dan kian sulit pula menurunkannya. Bila kemudian target penurunan tengkes gagal dicapai, bahkan meleset, tak jauh dari prediksi awal.

Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang dirilis pada 25 April 2024 menunjukkan prevalensi tengkes hanya turun 0,1%, dari 21,6% (2022) menjadi 21,5% (2023). Diperkirakan tengkes pada tahun ini berkisar 18%-19%.

Mengapa ini terjadi? Pemerintah, mau tidak mau, harus mengevaluasi secara jujur "kegagalan" ini. Evaluasi jujur penting untuk menemukan apa sebenarnya akar masalahnya. Dari akar masalah itu kemudian diramu jalan keluar agar tidak jatuh pada lubang yang sama di masa depan.

Dari sisi anggaran, jumlahnya memadai. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana puluhan triliun rupiah. Pada tahun 2022 misalnya, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 45 triliun guna membiayai program penanganan tengkes. Masalahnya, seperti kritik Presiden Jokowi, di suatu daerah 80% anggaran habis untuk rapat, perjalanan dan penguatan. Dana yang dinikmati oleh penderita tengkes hanya 20%. Oleh karena itu, efektivitas penganggaran perlu diperbaiki.

Dari penanganan tengkes selama ini disadari bahwa persoalan *stunting* lebih cepat diatasi jika bantuan pangan diikuti dengan perbaikan pola hidup dan kondisi lingkungan tempat tinggal, baik akses ke sumber air bersih maupun perbaikan sanitasi.

Amat disadari bahwa tengkes bersifat multidimensional. Tengkes bukan hanya masalah makanan yang kurang/tidak bergizi, tetapi juga terkait kesehatan lingkungan dan ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, seperti penanganan terhadap kemiskinan, penanganan tengkes menuntut kerja sama kementerian/lembaga (K/L) secara sinergis, terpadu dan terintegrasi.

Wujud konkret dari keterpaduan itu tampak dari program penanganan tengkes yang menggunakan intervensi spesifik dan sensitif. Kedua intervensi ini dipadukan agar penanganan tengkes bisa berkelanjutan.

Intervensi spesifik yang dilakukan Kementerian Kesehatan ada-



Khudori,
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP)

lah pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan Program Makanan Tambahan untuk anak maupun ibu hamil (Khomsan, 2024).

Sedangkan K/L lain mengintervensi: perbaikan kesehatan lingkungan dan bantuan jamban sehat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program pengentasan kemiskinan lewat Bantuan Pangan Nontunai dan Program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial, pemberdayaan perempuan oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kawasan Rumah Pangan Lestari oleh Kementerian Pertanian.

Kolaborasi

Betapa kolaborasi menjadi kata kunci keberhasilan penanganan *stunting* tergambar dari 23 K/L dalam program-program tengkes di bawah kantor Sekretarisariat Wakil Presiden. Keberhasilan satu K/L akan menentukan keberhasilan program. Sebaliknya, kegagalan satu K/L bisa mengancam keseluruhan program.

Masalahnya, kolaborasi menjadi kata mewah yang mudah diucapkan tapi sulit direalisasikan. Ini terbukti dari fakta bahwa konvergensi delapan layanan dasar yang disediakan pemerintah (kesehatan, gizi, sanitasi, air bersih, jamban, pendidikan, pertanian dan jaminan sosial) masih minim diakses sasaran: kurang 0,1% anak usia

dua tahun bisa mengakses semua layanan secara simultan (Meilissa, 2019).

Temuan ini setidaknya menegaskan empat hal penting: (1) lemahnya koordinasi antar K/L; (2) minimnya kapasitas perencanaan, penganggaran serta monitoring-evaluasi; (3) ketidakmampuan mengawal ketepatan dan kualitas layanan dasar; serta (4) minimnya upaya peningkatan *demand* masyarakat.

Penekanan pentingnya pendekatan *food-based* untuk pencegahan dan penanganan tengkes diyakini menjadi titik masuk penting berhasil-gagalnya program. Masalahnya bantuan makanan ini seringkali dicampurkan dengan bantuan sembako buat keluarga. Penting dipastikan anak *stunting* dapat pangan bergizi dari program yang ada. Bukan mengandalkan akses pangan bergizi dari bantuan sembako.

Stunting dimulai saat bayi dalam kandungan, terkait asupan gizi ibu dan asupan gizi yang tak seimbang saat balita. Pemerintah

dan kurang berprestasi di sekolah. Bahkan sulit meraih pekerjaan optimal saat usia produktif. Jika gaya hidupnya tak sehat, bakal terkena penyakit degeneratif saat tua.

Revitalisasi posyandu

Stunting memang multikompleks. Namun, faktor utamanya adalah kemiskinan. Saat inflasi tinggi harga pangan terasa mahal. Warga miskin yang 70% pendapatannya tersedot untuk pangan harus merealokasikan belanja dengan menekan pos nonpangan, seperti kesehatan atau beralih ke pangan inferior, guna mengamankan perut.

Dampaknya, konsumsi energi dan protein menurun. Rendahnya kualitas asupan berdampak panjang, bukan hanya pada kesehatan tapi juga produktivitas sumber daya manusia (SDM). Anak balita, ibu hamil dan lansia adalah tiga serangkai yang paling rentan kekurangan gizi. Apabila kita bangga karena memiliki bonus demografi yang akan membawa Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh tahun pada 2030, itu mensyaratkan sumber daya manusia unggul. Sumber manusia unggul mustahil dicetak jika gizi kurang/buruk dan *stunting*.

Selain memperbaiki efektivitas anggaran dan menyolidkan kolaborasi, titik krusial untuk mencegah dan mengatasi tengkes dimulai dari revitalisasi posyandu (Khomsan, 2023). Posyandu adalah pintu awal untuk mengenali yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan langkah mencegah dan mengatasi tengkes di tingkat rumah tangga.

Prevalensi tengkes yang masih tinggi menunjukkan selama ini posyandu nyaris tidak berdaya mengenali dan mengatasi problem gizi di level komunitas akar rumput. Revitalisasi posyandu dilakukan dengan memastikan pemberian susu dan telur pada anak dan ibu hamil, serta penghargaan finansial yang layak bagi penggerak. Memfungsikan posyandu hanya untuk menimbang balita dan proyek sosial masyarakat mesti diakhiri.



Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERAN

Title	2045, Permintaan Sawit Domestik untuk Energi 40 Juta Ton	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	TI	

2045, Permintaan Sawit Domestik untuk Energi 40 Juta Ton

JAKARTA, ID—Permintaan minyak sawit untuk pemenuhan kebutuhan energi domestik pada 2045 diperkirakan 22,4-40,12 juta ton, naik pesat dari 2023 yang hanya 10,64 juta ton. Karena itu, produksi minyak sawit nasional pada 2045 harus mencapai 86,51 juta ton dari 2023 yang masih 50,06 juta ton. Peningkatan produksi minyak sawit sebesar itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan peremajaan sawit (*replanting*) 120 ribu hektare (ha) setiap tahun mulai 2025.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabul Wijayanto mengatakan, permintaan (*demand*) minyak sawit pada 2045 akan sangat besar dan itu harus dibarengi dengan peningkatan produksi. Data yang diolah BPDPKS dari berbagai asosiasi hulu-hilir sawit, permintaan untuk ekspor pada 2045 diperkirakan mencapai 33,19 juta ton. Pada 2045, kebutuhan domestik untuk pangan diproyeksikan 15,34 juta ton, energi (biodiesel) 22,4 juta ton (B35) dan menjadi 40,12 juta ton apabila ditingkatkan menjadi B100, serta oleokimia 10,68 juta ton. "Total kebutuhan atau *demand* minyak sawit nasional pada 2045 diperkirakan 81,61 juta ton, sehingga produksi harus bisa 86,51 juta ton. Bisa 86,51 juta ton asalkan *replanting* tiap tahun 120 ribu ha mulai 2025, kalau tidak bisa ya turun (produksi) jadi 44 juta ton, lebih turun lagi dari sekarang," ungkap Kabul.

Saat seminar bertajuk Menakar Keseimbangan Produksi CPO untuk Kebutuhan Domestik dan Ekspor: Urgensi dan Tantangan yang dipantau dari kanal media sosial Warta Ekonomi, Kabul menjelaskan, pemerintah telah menggeber *replanting* dengan menggalakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didanai dari pungutan ekspor sawit yang dihimpun oleh BPDPKS. Tujuannya, memacu produktivitas agar produksi sawit meningkat. Apabila produktivitas makin menurun, bisa timbul masalah ketidakcukupan dalam memenuhi permintaan yang kian besar. "Peningkatan produktivitas dilakukan dengan PSR. Kami menargetkan *replanting* melalui PSR seluas 120 ribu ha di 2024, tapi faktanya selama BPDPKS ada (berdiri) itu paling tinggi realisasinya 97 ribu ha," jelas Kabul. (tl)

Tittle	Panen Buah Melon di Sidoarjo	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	Ant	



Panen Buah Melon di Sidoarjo

Petani mengumpulkan buah melon di persawahan kawasan Lebo, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (19/6/2024). Ukuran buah melon yang dihasilkan saat panen di daerah tersebut kurang maksimal akibat hujan dan menyebabkan harga melon turun dari Rp9.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak memproduksi melon di Indonesia lantaran mencapai 62.287 ton pada 2022. Jumlah itu setara dengan 52,48% dari total produksi melon secara nasional.

ANT

Title	Sosialisasi Kuota Baru Pupuk Bersubsidi ke Petani Dimasifkan	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	Tri Listiyarini	

REALISASI PENYALURAN 29%

Sosialisasi Kuota Baru Pupuk Bersubsidi ke Petani Dimasifkan

JAKARTA, ID—Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per 15 Juni 2024 mencapai 2.799.751 ton, atau 29% dari total alokasi 2024 yang sebesar 9,55 juta ton. Masih rendahnya distribusi sarana produksi (saprodi) pertanian tersebut di antaranya karena banyak petani di Tanah Air yang belum mengetahui penambahan alokasi pupuk bersubsidi tahun ini. Karena itu, agar produksi beras 2024 tetap terjaga, sosialisasi atas melimpahnya pupuk bersubsidi dan kemudahan dalam mengaksesnya akan masif dilakukan oleh pemerintah bersama BUMN penyalur.

Oleh Tri Listiyarini

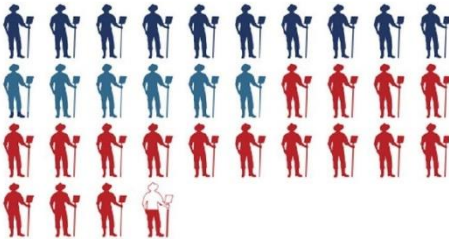
Semula, merujuk Kepmen-tan Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023, alokasi pupuk bersubsidi 2024 ditetapkan 4.732.519 ton dengan anggaran subsidi Rp 26,7 triliun. Rincian alokasinya, urea 2.711.428 ton, NPK 2.001.352 ton, dan NPK (kakao) 19.739 ton. Saat ini, alokasi pupuk bersubsidi 2024 ditetapkan menjadi 9,55 juta ton, ini sesuai Kepmen-tan Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tertanggal 22 April 2024, yakni urea 4.634.626 ton, NPK (15-10-12) 4.278.504 ton, NPK Formula Khusus 136.870 ton (kakao), dan organik 500 ribu ton. Anggaran subsidi untuk 9,55 juta ton pupuk itu Rp 53,3 triliun, bertambah Rp 26,6 triliun dari sebelumnya Rp 26,7 triliun.

Meski alokasi anggaran dan volume pupuk bersubsidi 2024 bertambah, sesuai Permentan No 01 Tahun 2024, tidak terjadi perubahan komoditas sasaran. Pupuk bersubsidi diberikan bagi sembilan komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Untuk harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi 2024, yakni urea Rp 2.250 per kilogram (kg), NPK Rp 2.300 per kg, NPK Formula Khusus Rp 3.300 per kg, dan organik Rp 800 per kg, atau tidak berubah (tidak naik) dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi (ke distributor) per 15 Juni 2024 mencapai 2.799.751 ton (29% dari alokasi 9,55 juta ton), yakni urea 1.586.663 ton (34%), NPK 1.203.754 ton (28%), NPK Formula Khusus 9.334 ton (7%), dan organik nihil.

Menurut Sekjen Kementan

Subsidi Pupuk untuk Petani Indonesia

Dari total **33,5 juta petani** yang disensus pada 2018, penerima subsidi pupuk pada 2019 mencapai **10,78 juta petani**.



Pada tahun 2022, jumlah tersebut diestimasikan meningkat **48,42%** menjadi **16 juta petani**.

SUMBER: KEMENKO PEREKONOMIAN, B-UNIVERSE RESEARCH

terian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto, peran pupuk bersubsidi sangat penting guna memacu produksi beras nasional. Berdasarkan pengalaman, keterbatasan volume dan aksesibilitas pupuk bersubsidi menyebabkan produksi beras 2023 turun dari 2022. Karena itu, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk mempercepat penyalurannya, itu bukan hanya agar produksi beras meningkat tapi supaya petani sejahtera. "Penurunan produksi beras 2023 hingga 0,44 juta itu salah satu penyebabnya terkait persoalan ketersediaan dan aksesibilitas pupuk bersubsidi. Karena itu, pemerintah berupaya agar tata kelola pupuk bersubsidi lebih baik lagi ke depan guna memberikan yang terbaik bagi para petani di Indonesia," kata Prihasto. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional 2023 mencapai 31,1 juta ton dan 2022 sekitar 31,54 juta ton.

Limas Kendala

Saat rapat dengan pendapat Komisi IV DPR dengan pemangku kepentingan di sektor pupuk, di antaranya Kementan, Kementan

rian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai BUMN penyalur, di Jakarta, Rabu (19/06/2024), terdapat lima kendala yang membuat penyaluran pupuk bersubsidi 2024 masih rendah. Kendala itu, pertama, sebanyak 58% petani (8,2 juta petani) hingga Mei 2024 yang terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDCK) belum melakukan pennebusan pupuk bersubsidi. Sekjen Kementan Prihasto Setyanto menuturkan, petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai e-RDCK 2024 adalah 14,2 juta orang. "Pennebusan pupuk bersubsidi oleh petani sudah dipermudah. Sesuai Permentan No 01 Tahun 2024 pasal 15, pennebusan pupuk bersubsidi dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu tani," ungkap Prihasto.

Kendala kedua, regulasi/kebijakan di daerah yang membatasi pemanfaatan alokasi pupuk baru. Ketiga, penerbitan surat keputusan (SK) alokasi gubernur (32 dari 34 provinsi) dan SK alokasi kabupaten (392 dari 478 kabupaten/kota) untuk tambahan anggaran belum sepenuhnya terbit.

Informasi dari PIHC menyebutkan, untuk SK alokasi gubernur, tinggal DKI Jakarta dan Papua yang belum terbit. Di sisi lain, untuk SK alokasi kabupaten/kota saat ini sudah menjangkau 8,8 juta ton dari 9,55 juta ton pupuk bersubsidi, atau masih sekitar 700 ribu ton yang belum mendapatkan SK alokasi. Keempat, tingkat kehati-hatian kios terhadap penyaluran pupuk bersubsidi guna menghindari potensi koreksi salur dari tim verifikasi dan validasi (verval) yang menjadi beban kios (koreksi Januari-Maret Rp 15,6 miliar). Kelima, perubahan musim yang menyebabkan adanya perubahan pola tanam di beberapa wilayah.

Solusi atau tindak lanjut dari kendala penyaluran itu, antara lain pemerintah melalui Kementan berkoordinasi dengan BUMN penyalur melakukan pemetaan (*mapping*) data petani yang tidak melakukan pennebusan selama tiga tahun terakhir akan dikeluarkan dari e-RDCK, juga dilakukan program Tebus Pupuk Bersama. Lalu, dilakukan sosialisasi/advokasi kepada pemerintah daerah dan Dinas Pertanian perihal Permentan No 01 Tahun 2024, mendorong percepatan SK gubernur

dan SK bupati/walikota, berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam penyamaan persepsi dan standarisasi verval penyaluran pupuk antara PPL dan kios.

Tekan Impor Beras

Selain menambah alokasi pupuk bersubsidi, pemerintah juga menggeber pemancangan pompa (pompanisasi) demi menggenjot produksi beras nasional 2024. Harapannya, impor beras tidak kian besar. Saat meninjau Program Bantuan Pompa Air di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (19/06/2024), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pompanisasi harus dilakukan di semua provinsi yang diperkirakan kekeringan panjang Juli-Oktobre tahun ini. "Dengan pompanisasi kita harapkan panen maksimal tidak hanya di tahun tanam pertama tapi juga kedua dan ketiga tetap sama. Ini agar impor beras kita tidak makin membesar," jelas Jokowi. Perum BULOG telah merealisasikan impor beras 2 juta ton dari total penugasan 3,6 juta ton tahun ini.

Kepala Negara menjelaskan, dalam menghadapi kekeringan panjang, pengelolaan air (*water management*) sangat penting. Pompanisasi dilakukan dengan menarik air dari sungai atau dari air tanah. Kekeringan panjang juga akan ditangani dengan hujan buatan. "Kekeringan panjang sudah diperkirakan BMKG, ini ditutupi dengan pompanisasi. Tidak hanya di Jateng, di semua provinsi yang nanti Juli, Agustus, September, dan Oktober itu kekeringan panjang," papar Jokowi. Khusus di Jateng, target produksi gabah kering giling (GKG) 9,8 juta ton, dengan pompanisasi diharapkan bertambah 1,3 juta ton. Pompa sudah didatangkan di Jateng 4.300 unit dengan kapasitas 8,5-18 PK.

Title	Food industry seeks more local inputs amid costly imports	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	The Jakarta Post	
Page	4	
Author	JP/Yohana Belinda	

Food industry seeks more local inputs amid costly imports

The Jakarta Post

Jakarta

The local food and beverage industry is seeking alternate sources of raw materials, as imports become more costly amid the continued weakening of the rupiah against the US dollar.

Indonesian Food and Beverage Association (GAPMMI) chairman Adhi S. Lukman said on Tuesday that businesses had begun implementing several strategies to mitigate the rising input costs so that they would not translate to higher prices at the consumer level.

"The industry is anticipating this by improving our efficiency and seeking alternate inputs locally or through other countries," Adhi said, as quoted from *Bisnis*.

Over 60 percent of the raw materials for the local food industry were sourced from imports, Adhi said, citing that this included wheat, refined sugar, corn and dairy.

This made their input costs prone to price changes, especially when the rupiah faltered against the greenback.

The rupiah traded lower against the US dollar throughout the course of this month. It hovered at Rp 16,374 on Friday, having weakened by 0.75 percent since the end of May, according to Bank Indonesia JISDOR, a reference rate that represents the spot FX rate of the US dollar against rupiah in the interbank FX market.

The currency weakened to over Rp 16,400 per dollar on Friday and moved to almost Rp 16,500 per dollar on Monday, according to data from *Investing.com*. It then bounced back to around Rp 16,360 per dollar figure on Tuesday.

He saw a hike in production costs as something to be expected in the near future, but he said firms were unlikely to hike their product prices anytime soon, thereby eating away at their margin in the process.

Bank Indonesia's consumer confidence index (IKK) declined to 125.2 points in May from the previous month's figure of 127.7 points.

If the index hovers above 100 points, it implies that consumers remain optimistic about the economy thus continue to

spend, whereas below that level indicates the opposite.

Respondents to BI's survey expressed less confidence regarding their income and job prospects in May. They were also less inclined to purchase durable goods, which include long-lasting consumer products like cars and furniture.

The Indonesian Employers Association (Apindo) said on Monday that the rupiah's depreciation against the US dollar made an unfavorable business climate, as quoted from *Tempo*. This situation is deemed not conducive for the growth of domestic industries or exports.

The Industry Ministry has made a push for the downstreaming of domestic agricultural products so that these could beef up the supply of locally sourced raw materials for industries.

For instance, the country has a potential to substitute rice as source of carbohydrates with cassava, sago, *porang* (elephant foot yam) and sorghum, which all could be locally grown in the archipelago.

— JP/YOHANA BELINDA

Title	Not fruitful	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	The Jakarta Post	
Page	4	
Author	Antara/Umarul Faruq	

Not fruitful



Antara/Umarul Faruq

Farmers carry melons during the harvest on Wednesday in Lebo, Sidoarjo, East Java. Heavy rains have led to lower quality melons, and have decreased the price from Rp 9,000 (55 US cents) per kilogram to Rp 8,000.

Title	Antisipasi Kekeringan Jokowi Tinjau Proyek Pompanisasi di Jateng	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Sukabumi Ekspres	
Page	2	
Author	Anisha Aprilia	

Antisipasi Kekeringan, Jokowi Tinjau Proyek Pompanisasi di Jateng

Antisipasi Kekeringan, Jokowi Tinjau Proyek Pompanisasi di Jateng

- Presiden Jokowi meninjau program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. Jokowi mengatakan program pompanisasi ini tidak hanya dilakukan di wilayah Jawa Tengah saja. Menurutnya, pompanisasi ini bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi potensi kekeringan yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

"Ini pompanisasi tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Karanganyar aja, tapi di semua provinsi yang kita perkirakan nanti di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, akan terjadi kekeringan yang panjang,"

kata Jokowi usai meninjau bantuan program bantuan pompa air, di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024.

Dengan adanya bantuan pompa air, dia menargetkan peningkatan produksi padi di Jawa Tengah sebesar 1,3 juta ton. Di Provinsi Jateng sendiri, pemerintah menyalurkan 4.300 pompa air yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

"Di Jawa Tengah sudah kedatangan pompa, sudah diterima di provinsi, di Kodam, itu 4.300 pompa, baik yang PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK seperti yang ada di sini," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memberikan penjelasan mendalam tentang strategi pemerintah untuk

mengatasi dampak El Nino dan kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung lebih awal. Menurutnya, pompanisasi merupakan langkah konkret yang cepat dalam memitigasi dampak kekeringan.

"Kenapa kita pasang pompa air? Karena ini adalah solusi cepat. Hari ini kita pompa, hari ini kita bisa tanam karena kalau kita cetak sawah itu butuh waktu," ujar Menteri Pertanian.

Menteri Pertanian melanjutkan, upaya ini diharapkan tidak hanya akan mengatasi kekurangan pasokan air di musim kering tetapi juga meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan para petani.

Pemerintah menargetkan pompanisasi ini dapat menjangkau 1 juta hektare lahan pertanian dan berencana untuk mencetak sawah baru seluas 1 juta hektare per tahun sebagai strategi jangka panjang. Ini merupakan bagian dari usaha besar untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia di masa depan.

"Harapan kita ke depan, mari kita sinergi, mari kita kolaborasi untuk negeri yang kita cintai. Karena mimpi besar kita adalah mencukupi beras dalam negeri, bahkan syukur-syukur ke depan bisa kita memberi, membantu saudara-saudara kita yang kelaparan kepada negara lain," tutup Menteri Pertanian. (Anisha Aprilia)

Tittle	Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Gencarkan Pompanisasi	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Suara Merdeka	
Page	9	
Author	Suara Merdeka	

Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Gencarkan Pompanisasi

■ Jateng Penyangga Pangan Nasional

KARANGANYAR - Pemerintah menggencarkan pompanisasi guna mengantisipasi kekeringan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pompanisasi tidak hanya di Jawa Tengah tetapi di seluruh provinsi yang diperkirakan akan mengalami kekeringan panjang pada Juli-Oktober.

“Kita ingin mengantisipasi adanya kemungkinan kekeringan dan panas jangka panjang yang diperkirakan mulai Juli-Agustus nanti. Sehingga perlu diantisipasi ini dengan pompanisasi di semua provinsi agar produktivitas pertanian tidak turun, bahkan bisa naik,” kata Jokowi saat meninjau proses pengairan sawah melalui pompanisasi di Desa Kalibeji Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Rabu (19/6).

Dalam kunjungan itu, Jokowi ditemani Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana, dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha. Selain mengecek mesin pompa penyedot air, Jokowi juga melihat aliran air hasil pompanisasi itu ke areal persawahan. Presiden juga juga disambut para petani dan warga yang berkerumun di lokasi tempat peninjauan itu.

Selain di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jokowi juga meninjau bantuan pompa air di Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dan Desa Kredawahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Tambah Produktivitas

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga kebutuhan pangan nasional. Pada 2023, produktivitas padi di provinsi ini mencapai 9,08 juta ton gabah kering giling (GKG)

GKG atau setara 5,22 ton beras.

Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, sebaran bantuan pompa air di seluruh Jateng selama 2019-2024 mencapai 7.770 unit. Sementara itu jumlah bantuan irigasi perpompaan sebanyak 894 unit tersebar di 31 kabupaten/kota. Bantuan pompa tersebut dapat meningkatkan produktivitas petani sebesar 47,57 ton.

“Kalau proses ini berhasil maka akan ada tambahan sekitar 1,2 juta sampai 1,5 juta ton,” kata Nana Sudjana di sela mendampingi Jokowi meninjau realisasi bantuan pompa air di Desa Kredawahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Rabu (19/6).

Bantuan pompa air dan alsintan yang diberikan kepada kelompok tani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas sawah tadah hujan di Jawa Tengah 267.691 hektare. Produksi gabah kering giling (GKG) 9.886.140 ton, penyediaan beras 5.788.814 ton, kebutuhan beras 4.060.888 ton, sehingga surplus beras 1.750.211 ton.

Di Kabupaten Karanganyar luas sawah tadah hujan mencapai 2.320 hektare dengan produksi GKG sebanyak 251.816 ton. Alokasi bantuan pompa air sebanyak 61 unit dan irigasi perpompaan sebanyak 23 unit.

Bantuan pompa air di Kabupaten Karanganyar tersebut berkontribusi dalam peningkatan produksi sebanyak 11.600 ton. Dari 251.816 ton menjadi 263.416 ton atau naik 4,61 persen.

Salah seorang anggota Kelompok Tani Sumber Waras 4 Kabupaten Karanganyar, Mulyadi mengatakan bahwa selama puluhan tahun petani mengandalkan hujan untuk menanam padi. Di sela itu biasanya petani meminta air dari daerah lain. Namun, bantuan air itu kadang datang terlambat. (H32,H44,F5,ekd-44)

Title	Jokowi Ingin Produksi Pertanian Jateng Bertambah 13 Juta Ton	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Tribun Jateng	
Page	9	
Author	Ais/rez	

Jokowi Ingin Produksi Pertanian Jateng Bertambah 1,3 Juta Ton

► Kementerian Pertanian Salurkan 4.300 Pompa Air untuk Petani di Jawa Tengah

KARANGANYAR, TRIBUN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau program pompanisasi di Dukuh Sangiran, Dusun Ngrawan, Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Rabu (19/6). Kedatangan Jokowi bersama rombongan disambut warga sekitar, yang telah menunggu sejak pagi hari.

Pada kesempatan itu, Jokowi yang didampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana; serta Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi, meninjau program pompanisasi secara langsung. Para petani di wilayah tersebut biasanya memanfaatkan air dari aliran Sungai Cemoro yang merupakan anak dari Sungai Bengawan Solo untuk mengairi area persawahan.

Jokowi menyampaikan, program pompanisasi tidak hanya dilakukan di wilayah Karanganyar maupun Jateng, tetapi di semua provinsi di In-

donesia, yang diperkirakan terjadi kekeringan panjang, pada periode Juli-Agustus-Oktober. Melalui program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian selama kemarau panjang.

"Contoh di Jateng target kita (produksi pertanian) 9,8 juta ton (per tahun), dengan pompanisasi kita ingin ada tambahan 1,3 juta ton," kata Jokowi, sesuai meninjau program pompanisasi.

Dia menuturkan, ada 4.300 pompa air yang telah didistribusikan kepada para petani di wilayah Jawa Tengah. Melalui alat pompa, terangnya, petani bisa mengambil air dari sungai untuk mengairi lahan pertanian, maupun air dari dalam tanah. Saat ditanya terkait penanganan debit air yang berkurang selama kemarau, lanjutnya, akan dioptimalkan melalui rekayasa cuaca untuk membuat hujan buatan sehingga debit air dapat meningkat.

Timotius Suryadi menambahkan, luas lahan tanah

sawah di Kabupaten Karanganyar 19.947 hektare. Dari luasan tersebut, ada 12.926 hektare sawah irigasi dan 7.019 hektare sawah nonirigasi. Kabupaten Karanganyar mendapatkan bantuan pompanisasi 61 unit. Bantuan tersebut salah satunya dialokasikan di wilayah Kecamatan Gondangrejo.

Pada hari yang sama, Jokowi juga meninjau program pompanisasi pertanian di Kabupaten Klaten dan Semarang. Pemkab Klaten mendapatkan bantuan 92 unit pompa air untuk mengairi sawah tadah hujan di wilayah tersebut. Ada sekitar 1.361 hektar sawah tadah hujan yang membutuhkan pengairan saat musim kemarau.

Salah satunya pompanisasi di Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, yang tinjau secara langsung Presiden Jokowi.

Sementara di Kabupaten Semarang, Jokowi meninjau pompa di persawahan Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang. Bantuan pompa air di Kabupaten Semarang tersebut pada 2024 digelontorkan sebanyak 47 unit. Adapun potensi luas sawah tadah hujan di Kabupaten Semarang mencapai 5.318 hektare. Selain bantuan pompa, Kabupaten Semarang juga mendapat bantuan alat mesin pertanian, berupa 1 traktor roda empat senilai Rp 3,8 miliar dan 31 unit traktor roda dua.

(ais/rez)



TRIBUN JATENG/AGUS ISWADI

POMPANISASI - Jokowi berbincang dengan petani saat meninjau program pompanisasi di Dukuh Sangiran, Dusun Ngrawan, Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Rabu (19/6).

Title	Jokowi Tinjau Proyek Pompanisasi	
Date	20 Juni 2024	
Media	Radar Garut	
Page	2	
Author	Dis	



CEK. Presiden Jokowi meninjau program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. Jokowi mengatakan program pompanisasi ini tidak hanya dilakukan di wilayah Jawa Tengah saja.

Jokowi Tinjau Proyek Pompanisasi

JAKARTA - Presiden Jokowi meninjau program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. Jokowi mengatakan program pompanisasi ini tidak hanya dilakukan di wilayah Jawa Tengah saja. Menurutnya, pompanisasi ini bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi potensi kekeringan yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

"Ini pompanisasi tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Karanganyar aja, tapi di semua provinsi yang kita perkirakan nanti di bulan Juli,

Agustus, September, Oktober, akan terjadi kekeringan yang panjang," kata Jokowi usai meninjau bantuan program bantuan pompa air, di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024.

Dengan adanya bantuan pompa air, dia menargetkan peningkatan produksi padi di Jawa Tengah sebesar 1,3 juta ton. Di Provinsi Jateng sendiri, pemerintah menyalurkan 4.300 pompa air yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

"Di Jawa Tengah sudah didatangkan pompa, sudah diterima di provinsi, di Kodam, itu 4.300 pompa, baik yang

PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK seperti yang ada di sini," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memberikan penjelasan mendalam tentang strategi pemerintah untuk mengatasi dampak El Nino dan kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung lebih awal. Menurutnya, pompanisasi merupakan langkah konkret yang cepat dalam memitigasi dampak kekeringan.

"Kenapa kita pasang pompa air? Karena ini adalah solusi cepat. Hari ini kita pompa, hari ini kita bisa tanam karena

kalau kita cetak sawah itu butuh waktu," ujar Menteri Pertanian.

Menteri Pertanian melanjutkan, upaya ini diharapkan tidak hanya akan mengatasi kekurangan pasokan air di musim kering, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan para petani.

Pemerintah menargetkan pompanisasi ini dapat menjangkau 1 juta hektare lahan pertanian dan berencana untuk mencetak sawah baru seluas 1 juta

hektare per tahun sebagai strategi jangka panjang. Ini merupakan bagian dari usaha besar untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia di masa depan.

"Harapan kita ke depan, mari kita sinergi, mari kita kolaborasi untuk negeri yang kita cintai. Karena mimpi besar kita adalah mencukupi beras dalam negeri, bahkan syukur-syukur ke depan bisa kita memberi, membantu saudara-saudara kita yang kelaparan kepada negara lain," tutup Menteri Pertanian. **(dis)**

Tittle	Menteri Juga Siap Hadir	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Tribun Timur	
Page	5	
Author	Fqh	

Menteri Juga Siap Hadir

JAJARAN menteri Kabinet Indonesia Maju juga dijadwalkan hadir, seperti Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Nantinya pengunjung juga berkesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik, termasuk mobil, umrah, motor, dan ratusan hadiah hiburan lainnya.

Ketua PW Muhammadiyah Sulsel

Prof Ambo Asse begitu mendukung hadirnya pameran ekonomi syariah terbesar di Sulsel. "Semoga ini sukses , Muhammadiyah punya 12 majelis 11 lembaga, salah satunya majelis Ekonomi, lembaga UMKM.

Senada dengannya, Ketua MUI Sulsel Prof AG Najamuddin turut menjelaskan bagaimana peran MUI dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan. Bahkan saat ini, MUI sebutnya sedang dalam misi besar menjalankan program Wajib Halal Oktober (WHO). **(fqh)**

Title	MUI-Muhammadiyah Sulsel Gelar MIF 2024	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Fajar Makassar	
Page	9 Part 1	
Author	Wis/yuk	



DEWI SARTIKA/FAJAR

EVENT AKBAR. Pengurus MUI dan Muhammadiyah Sulsel membahas persiapan MIF 2024 saat konferensi pers di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel, Rabu, 19 Juni.

MUI-Muhammadiyah Sulsel Gelar MIF 2024

MAKASSAR, FAJAR — Pameran terbesar di Sulsel, Makassar Islamic Fair (MIF) 2024 bersiap digelar di Kawasan CPI, selama 31 Juli hingga 25 Agustus mendatang.

Event akbar ini digagas

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel. Menghadirkan 500 tenant, di antaranya fesyen, pendidikan, literasi, hingga dakwah.

Ketua Panitia MIF 2024,

Prof Mustari Bosra mengungkapkan, pameran ini tidak hanya menjadi ajang bertukar informasi. Tetapi juga menawarkan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan.

❖ Baca **MUI... Hlm 11**

Title	MUI-Muhammadiyah Sulsel Gelar MIF 2024	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Fajar Makasar	
Page	9 Part 2	
Author	Wis/yuk	

MUI-Muhammadiyah Sulsel Gelar MIF 2024

❖ Lanjutan Halaman... 9

"Kami ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah melalui acara ini. Salah satunya dengan mengundang beberapa pihak sekolah untuk hadir. Mereka tak sekadar meramaikan, tetapi mengajak untuk ikut berlomba," tuturnya saat konferensi pers di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Rabu, 19 Juni.

Selain pameran, ada kegiatan dakwah dan tablig menghadirkan mubalig yang diminati oleh generasi masa kini.

"Ada kegiatan pelatihan

dan kompetisi, termasuk akan diperlombakan siswa SMA membuat bisnis plan dan mempresentasikannya," ucapnya.

Pemenang akan diberikan modal usaha. Mereka diharapkan mengembangkan apa yang mereka rancang dengan modal yang didapatkan.

Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga dijadwalkan hadir. Sebut saja Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Saya sudah berkomu-

nikasi langsung dengan Menteri PMK, Prof Muhadjir. Insyaallah beliau yang akan membuka acara, pada Rabu, 31 Juli 2024," ungkap Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Negeri Makassar ini.

Ketua PWM Sulsel, Prof Dr KH Ambo Asse mengatakan, ada 13 majelis dan 11 lembaga di Muhammadiyah Sulsel. Salah satunya ada lembaga UMKM yang diturunkan untuk menggelar dan bertanggung jawab dalam pameran kali ini.

"Kegiatan ini diharapkan bisa sukses, dan gerakan ini bisa membangkitkan ekonomi. Seluruh

lembaga di perserikatan Muhammadiyah, diminta agar memberikan dukungan," ujarnya.

Ketua MUI Sulsel, Prof Dr AGH Najamuddin memaparkan, hampir setiap bulan pengusaha makanan meminta sertifikasi halal. Maka melalui pameran ini, MUI memperlihatkan bahwa mereka yang hadir adalah yang sudah mendapat sertifikat halal.

"Ini cara MUI untuk menyiapkan kerja maraton wajib halal pada Oktober. Sehingga mereka yang belum punya sertifikasi, bisa secepatnya mengurus," tandasnya. **(wis/yuk)**

Title	Pemprov Siap Bantu Sumur Bor Hingga Mesin Pompa	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Nusa Bali	
Page	4	
Author	K23	

Antisipasi Musim Kemarau Panjang

Pemprov Siap Bantu Sumur Bor Hingga Mesin Pompa



Kelompok tani di Buleleng yang mengusulkan irigasi perpompaan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau.

SINGARAJA, NusaBali

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali siap membantu sarana pertanian untuk mengantisipasi gagal panen di musim kemarau panjang. Sejumlah solusi sudah disiapkan di-

antaranya pembangunan sumur bor dan hingga bantuan mesin pompa untuk lahan sawah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Bali Dewa Made Indra ditemui Selasa (18/6) di Buleleng mengatakan, Pemprov Bali

sudah menginstruksikan Dinas Pertanian untuk memetakan lahan pertanian padi yang rawan kesulitan air irigasi saat musim kemarau. Selanjutnya daerah yang punya lahan berpotensi kekeringan dapat mengusulkan bantuan pembangunan sumur bor hingga bantuan pompa air.

"Distan sudah mengantisipasi prediksi musim kemarau. Bahkan minggu lalu sudah hadir di Tabanan membantu mesin pompa air. Sawah yang berpotensi kesulitan air dipetakan dan dihitung nanti dibantu solusinya. Misalnya ada air sungai terdekat itu bisa diadaptasi dengan disedot pakai pompa," terang Dewa Indra.

Bantuan yang disiapkan untuk mengantisipasi gagal panen di musim kemarau disebut pejabat asal Desa Pamaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini disediakan dengan anggaran keroyokan. Ada yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, termasuk CSR dari swasta.

Sementara itu Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun ini mengusulkan 15 unit irigasi perpompaan ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Usulan ini diajukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Selain juga untuk intensifikasi lahan pertanian khususnya padi.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian Buleleng, Made Siladarma, Rabu (19/6) kemarin menerangkan usulan sudah dikirimkan ke Kementan RI. Dia pun berharap seluruh usulan bisa disetujui. Menurutnya satu unit irigasi perpompaan terdiri dari paket mesin pompa, rumah mesin, bak penampungan, pemasangan listrik. Satu paket usulan itu senilai Rp 112 juta.

Selain itu target sasaran bantuan juga wajib memiliki jaringan irigasi tertutup atau terbuka. Selain juga diperbolehkan sumber air permukaan atau sumur dangkal yang sudah ada di lahan pertanian. **k23**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Tittle	Presiden Tinjau Bantuan Pompa di Klaten	
Date	20 Juni 2024	
Media	Jawa Pos	
Page	6	
Author	Ren/adi/dri	

Presiden Tinjau Bantuan Pompa di Klaten

KLATEN – Presiden Joko Widodo berkunjung ke Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Klaten, kemarin (19/6) pagi. Bersama rombongan, presiden mengecek langsung manfaat program pompanisasi di desa tersebut.

Begitu tiba, Jokowi meninjau mesin pompa air di pinggir Sungai Dengkeng. Rombongan kemudian

melihat aktivitas para petani dengan berjalan kaki sekitar 100 meter.

"Pak Presiden cukup senang. Alhamdulillah, airnya lancar," ujar Bupati Klaten Sri Mulyani yang kemarin mendampingi rombongan presiden.

Selain bupati, Jokowi kemarin didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PUPR Ba-

suki Hadi Moeljono, Plt Gubernur Jateng Nana Sudjana, serta Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi.

Mulyani menambahkan, ada 92 unit pompa air bantuan pemerintah pusat untuk seluruh wilayah Klaten. Dia berharap petani yang memiliki sawah tadah hujan bisa memanfaatkan pompa tersebut dengan maksimal. **(ren/adi/dri)**



KETAHANAN PANGAN: Presiden Jokowi bersama rombongan mengecek saluran irigasi di Desa Tumpukan, Karangdowo, Klaten, kemarin (19/6).

Tittle	Subani Daftar Bacawabup ke PAN Kediri	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Harian Bangsa	
Page	10	
Author	Uji/ns	

Subani Daftar Bacawabup ke PAN Kediri

Kediri-HARIAN BANGSA

Subani Suryo Atmojo (71) warga jalan Sumber, Kota Kediri, mendaftar sebagai bakal calon wakil Bupati Kediri ke DPD PAN Kabupaten Kediri, Rabu (19/6/2024).

Pensiunan PNS Kementrian Pertanian itu, dikenal sebagai orang yang tak kenal lelah, karena selalu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati maupun bakal calon Bupati baik di Kediri maupun di daerah lain setiap ada event Pilkada. Setidaknya, Subani pernah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kediri, Bupati Tulungagung dan Bupati Blitar dari tahun 2005-2015.

Di Kantor DPD PAN Kabupaten Kediri, Subani yang datang sendirian diterima oleh Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Kediri, Sumani. Setelah berdialog sebentar, akhirnya Subani menyerahkan formulir pendaftaran sebagai bakal calon wakil Bupati Kediri dan diterima oleh Sumani.

“Saya hanya mendaftarkan sebagai bakal calon wakil Bupati Kediri, karena saya menyadari sudah tidak muda lagi dan saya ingin mendampingi bakal calon Bupati Kediri yang masih muda yaitu Mas Dhito (Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana),” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Kediri, Sumani, mengatakan, bahwa kedatangan Subani ke DPD PAN Kabupaten Kediri ini untuk menyerahkan formulir pendaftaran yang sebelumnya sudah diambilnya.

“Yang jelas pihaknya (DPD PAN kabupaten kediri) sebatas hanya menjaring bakal calon Bupati Kediri maupun bakal calon wakil bupati Kediri. Setelah menerima berkas dari semua calon, akan diteruskan ke DPW PAN Jawa Timur. Selanjutnya akan diteruskan ke DPP PAN. Terkait rekomendasi semuanya terserah DPP PAN,” ucap Sumani.

Menurut Sumani, sejauh ini sudah ada dua bakal calon Bupati Kediri yang telah mengembalikan formulir pendaftaran yaitu Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Deny Widyanarko. **(uji/ns)**



Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Kediri, Sumani (kiri) saat menerima berkas pendaftaran dari bakal calon Wakil Bupati Kediri, Subani.

Foto: Muji Harjita/HARIAN BANGSA

Tittle	Tambah Produksi Padi Manfaatkan Lahan Tidur	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Sumatra Ekspres	
Page	6	
Author	Dik	

Tambah Produksi Padi, Manfaatkan Lahan Tidur

INDRALAYA - Ogan Ilir menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan program cetak sawah baru dari Kementerian Pertanian (Kementan) dengan *support* Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2024. Ada sekitar 98 ribu lahan di Sumsel yang akan menjalankan program cetak sawah baru. Di antaranya tersebar di Kabupaten Banyuasin, OKU Timur, Ogan Ilir, OKI, dan Muara Enim.

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Ogan Ilir, Abu Bakrin Sidik menjelaskan pihaknya sudah mempersiapkan 4.000 lahan yang akan digunakan untuk cetak sawah baru tersebut. "Tapi lahannya belum bisa kita kerjakan karena genangan airnya masih cukup dalam. Seharusnya perintah dari kementerian dalam bulan-bulan ini harus ada progres," ungkap Abi. Area persawahan di Ogan Ilir seperti di Pemulutan, Tanjung Pering dan lainnya rata-rata berada dekat area pinggir sungai. Sehingga lahannya akan segera tergenang jika debit sungai masih cukup tinggi.

Dikatakannya, dalam waktu dekat lahan cetak sawah di Desa Ulak Kembahang, Kecamatan Lubuk Keliat akan diawali untuk memulai program tersebut.

"Insya Allah kalau tidak ada kendala kita mulai di Desa Ulak Kembahang, Kecamatan Lubuk Keliat dengan total 131 hektare lahan sawah tadah hujan. Atau di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pemulutan sekitar 93 hektare," terangnya.

Begitu juga lahan di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan dengan luas sekitar 134 hektare yang juga disediakan untuk lahan cetak sawah baru.

Dijelaskannya, kementerian dalam program cetak sawah ini akan membantu kelompok tani dalam bentuk pengerjaan fisik. Terbagi untuk pengerjaan irigasi dengan biaya Rp4,6 juta per hektarnya yang dikerjakan oleh pihak ketiga.

Kemudian, bantuan benih dan pupuk juga sudah disediakan langsung oleh Kementan. "Kalau per hektare bantuan yang didapat petani sekitar 25 kg. Setiap kelompok minimal mempunyai 2-4 hektare yang dikelola," tandanya.

Namun, pihaknya berharap adanya bantuan program cetak lahan sawah baru ini dapat menambah produksi padi Ogan Ilir. "Selain itu dapat lebih memanfaatkan lahan-lahan rawa tidur yang selama ini kurang dirasakan keberadaannya," katanya. (dik)



FOTO: ANDIKA/SUMEXS

SAWAH BARU: Kementerian Pertanian (Kementan) dengan *support* Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2024 akan melakukan program cetak sawah baru.

Title	Teropong Produksi Padi
Date	20 Juni 2024
Media	Kabar Banten
Page	6
Author	Zaldi Dhuhana



Kementerian Pertanian

Teropong Produksi Padi

Oleh:
Zaldi Dhuhana

Staf Ahli Bupati Serang Bidang
Ekonomi Pembangunan &
Keuangan

MENURUT data United States Department of Agriculture (USDA) pada tahun 2023/-2024 Indonesia menempati urutan keempat negara produsen beras yaitu sebesar 33,02 juta ton atau 6% dari total produksi beras dunia. Nomor satu Cina (144,62 juta ton), diikuti India (134 juta ton) dan nomor tiga Bangladesh (37 juta ton). Urutan kelima Vietnam dengan produksi sebesar 27 juta ton. Menarik untuk menelisik lebih dalam produksi beras Vietnam. Negara Vietnam, dengan luas sawah 63,32% dari luas sawah Indonesia, memiliki produktivitas 1,27 kali lebih besar dari produktivitas padi di Indonesia. Dengan jumlah penduduk 98,19 juta jiwa, Vietnam mengalami surplus produksi dan berpeluang mengeksport beras ke luar negaranya.

Negara Bangladesh yang menempatkan urutan ketiga memiliki luas sawah yang tidak berbeda jauh dengan Indonesia seperti halnya produktivitas padi per hektare yang hampir sama dengan Indonesia. Namun dengan jumlah penduduk 171,2 juta jiwa upaya pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat relatif lebih ringan dibandingkan dengan Indonesia. Ditambah Bangladesh terletak pada kontinen anak benua India yang menjadikan biaya distribusi pangan relatif lebih rendah dan rantai pasok yang tidak terlalu rumit dibandingkan dengan negara Kepulauan.

Terlepas dari berbagai faktor di atas, perlu kiranya kita mengkaji lebih dalam berbagai hal terkait produksi beras nasional, mulai dari kebijakan, perilaku pasar dan tata niaga, karakteristik petani produsen padi, industri padi dan beras, rantai distribusi dan kartel beras di Indonesia.

Dosen Politeknik Statistik STISI pada acara Seminar Nasional Statistik tahun 2020 pernah membuat permodelan fungsi produksi padi Indonesia tahun 2016. Dari permodelan ini diperoleh kesimpulan bahwa luas lahan sawah, jumlah petani dan nutrisi tanaman berupa pemupukan memiliki pengaruh terhadap produksi padi di Indonesia.

Variabel pertama, luas lahan sawah, pada kenyataannya hari ini terus menyempit sejalan dengan perkembangan industri dan permukiman. Hal itu bisa dipahami dengan konsep Land Rent atau surplus nilai tanah. Konsep ini diterapkan pertama kali di Indonesia pada masa pemerintahan Sir Thomas Raffles Gubernur Jenderal Inggris di Pulau Jawa ketika Inggris menjajah Indonesia selama 5 tahun (1811-1816) sebagai

dampak perang Napoleon.

Dalam konsep land rent, nilai surplus tanah bergantung kepada jarak dari pusat kegiatan ekonomi. Semakin jauh dari pusat kegiatan ekonomi maka land rent akan semakin rendah. Jarak dalam konsep land rent sesuai konteks hari ini menjadi fungsi waktu tempuh. Itu sebabnya pusat kegiatan ekonomi berada tidak jauh dari akses jalan atau jalan tol. Dalam teori urbanisasi, pembangunan jalan akan mengarahkan (drive) permintaan terhadap lahan.

Pembangunan akses jalan yang bertujuan melancarkan arus produksi barang dan jasa dari dan ke wilayah pertanian di perdesaan dengan harapan harga komoditi pertanian menjadi lebih rendah pada gilirannya juga akan berdampak pada laju alih fungsi lahan pertanian. Pada kondisi ini kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan.

Land rent untuk penggunaan lahan untuk industri dan permukiman memiliki nilai surplus yang lebih besar dibandingkan penggunaan untuk pertanian secara umum. Sebidang tanah yang digunakan untuk pabrik sebagai contoh, akan memberikan peluang pendapatan pajak, penyerapan tenaga kerja, pengembangan permukiman untuk pekerja dan sektor jasa penunjang seperti bengkel, pedagang bahan pokok, sekolah, rumah ibadah dan sebagainya.

Berbeda halnya dengan penggunaan untuk sawah yang dianggap memiliki nilai surplus yang lebih rendah serta memiliki ketidakpastian yang tinggi. Gagal panen karena bencana alam dan serangan hama penyakit, harga input seperti pupuk dan pestisida yang terus meningkat, dan update pengetahuan petani pada secara umum dianggap menjadi penyebab usaha tani padi berisiko tinggi. Petani padi pada umumnya secara kelompok umur memiliki umur yang lebih tinggi dibandingkan petani komoditi lain contohnya komoditi hortikultura. Hal itu berdampak kepada kemampuan menyerap informasi, mengikuti perkembangan teknologi terkini dan kesediaan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Tentunya keadaan tersebut ikut mempengaruhi tingkat resiko usaha tani padi sawah. Penyuluh yang berintegritas dan kreatif menjadi kunci perubahan petani padi.

Sebenarnya cara menghitung land rent hanya didasarkan kepada usaha tani padi an sich tidaklah tepat. Selain sebagai salah satu faktor produksi, sawah memiliki fungsi yang lain. Fungsi sawah sebagai pengendali banjir dan ekologi, dan penunjang ketahanan pangan perlu dihitung sebagai nilai surplus lahan. Kerugian masyarakat akibat banjir, devisa yang dikeluarkan untuk impor beras, kerusakan lingkungan seandainya di-monetisasi secara tepat seperti kasus tambang ilegal PT Antam maka akan memberikan nilai land rent yang lebih fair terhadap lahan sawah.

Dalam kasus tambang ilegal PT Antam, perhitungan 271 triliun rupiah bukan kerugian PT Antam. Tapi dana yang harus dikeluarkan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak akibat

ibah pertambangan ilegal, nilai ekologi dan ekonomi lingkungan yang diklaim sebagai kerugian negara. Sama halnya dengan kasus lahan sawah yang juga harus menghitung kerugian yang timbul akibat hilangnya fungsi sawah sebagai pengendali banjir, penyangga ekologi dan penunjang ketahanan pangan. Nilai hasil perhitungan ini idealnya dikembalikan lagi ke sawah dalam bentuk kompensasi anggaran peningkatan produksi padi.

Variabel kedua dari fungsi produksi di atas adalah jumlah tenaga kerja atau jumlah petani. Saat ini angkatan kerja di sektor pertanian khususnya komoditi padi mengalami peningkatan umur rata-rata di atas 45 tahun. Sementara sektor pertanian padi dipandang tidak menarik oleh generasi muda. Migrasi tenaga kerja antar sektor tidak bisa dihindari, urbanisasi meningkat. Penuhuran jumlah petani selaras dengan rendahnya produktivitas padi di Indonesia dan resiko usaha tani padi yang belum bisa ditekan secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan alih fungsi lahan pertanian sehingga generasi kedua rumah tangga petani kehilangan tempat untuk berusaha. Hasil Sensus Pertanian 2023, Rumah tangga petani sektor tanaman pangan menurun sebesar 12,42% dibandingkan tahun 2013. Sektor pertanian belum mampu bersaing dengan industri manufaktur dan jasa, menjadi indikasi upaya menjadikan sektor pertanian sebagai keunggulan kompetitif seperti Vietnam belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan.

Pada saat terjadi kelangkaan tenaga kerja, mekanisasi pertanian menjadi satu keniscayaan agar tingkat produksi padi dapat tetap dipertahankan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah berupaya memperkenalkan dan mengembangkan mekanisasi pertanian melalui pemberian bantuan, pelatihan dan penyuluhan bagi petani. 10 tahun yang lalu, bantuan Combine Harvester kepada petani kurang diminati. Banyak kasus ditemukan, combine harvester bantuan disimpan di gudang karena dianggap berbiaya mahal dan kurang cocok dengan kondisi lahan. Ketika permasalahan kelangkaan tenaga kerja terjadi di depan mata pada masa sekarang, combine harvester menjadi primadona khususnya bagi wilayah persawahan yang datar dan luas seperti daerah Pantura pada umumnya. Terlebih perkembangan teknologi hari ini memungkinkan combine harvester digunakan pada beberapa tipe lahan sawah.

Perlu dipahami bahwa bantuan pemerintah tidak akan bisa memenuhi kebutuhan seluas areal sawah yang ada. Mekanisasi pertanian untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja pada akhirnya akan bertumpu kepada kekuatan masyarakat sendiri. Peran penting pemerintah titik tumpunya bergeser dari pemberi bantuan alat dan mesin pertanian menjadi lebih kepada agen rekayasa sosial ekonomi petani.

Alat dan mesin pertanian pada umumnya relatif mahal dan sebagian besar petani tidak mampu mengakses bila dis-

erahkan kepada perseorangan. Pembinaan menjadi kunci solusi namun dengan sistem kredit konvensional hari ini, masih banyak lembaga pemberi pinjaman ragu-ragu untuk menyalurkan kreditnya kepada petani kecil atau secara umum sektor pertanian padi sawah. Menurut data tahun 2018, kredit yang disalurkan kepada sektor pertanian di Kabupaten Serang kurang dari 10% dari total dana kredit perbankan sebesar 2,5 triliun rupiah.

Yang dilakukan oleh Muhamad Yunus dengan Grameen Bank melalui pengorganisasian kredit mikro dengan rekayasa sosial sudah banyak kita ketahui dan pada dasarnya bisa dilakukan di Indonesia. Contoh lain adalah FarMart yang didirikan Sanghera yang berpusat di Gurugram India. Lembaga pembiayaan berbasis agri-fintech telah sukses membiayai kredit mikro petani. Konsepnya mirip dengan Grameen Bank yaitu memberi pinjaman kepada Kelompok Pengguna Tertutup, biaya rendah, pembayaran yang fleksibel, pelayanan pada titik konsumen, dan sebagainya. Dengan metode ini kredit macet (non-performing loan) dibawah 1%.

Prinsip pemberian kredit salah satunya adalah Know Your Customer, kenal pelanggan anda. Hal ini berlaku pada kredit konvensional, bedanya adalah cara melihat konsumen bukan sebagai individu yang berdiri sendiri tapi merupakan entitas yang terikat dengan komunitasnya. Cara pandang kredit konvensional tidak tepat bila diterapkan untuk menilai petani kecil yang dianggap tidak memenuhi kriteria penyaluran kredit. Kasus ini seperti halnya titip ternak. Pemodal membeli domba atau sapi kemudian menitipkan kepada pemelihara di wilayah pedesaan kemudian hasil ternak yang lahir akan dibagi antara pemodal dan peternak. Pada kenyataannya metode kerjasama ini banyak yang gagal karena pemodal tidak mengenal pelanggannya dalam hal ini peternak. Dengan alasan ternak sakit lalu mati atau hilang, titip ternak banyak memberikan kerugian pada pemodal. Grameen bank dan FarMart menjadi contoh bagaimana rekayasa sosial ekonomi signifikan membantu petani kecil menjadi berdaya.

Di sisi lain pemberian bantuan pertanian secara cuma-cuma pada banyak kasus membuat petani atau kelompok tani kurang memiliki rasa tanggung jawab dan ketergantungan kepada bantuan. Penerima bantuan dalam format kelompok tani yang dimaksudkan pada awalnya agar bantuan dapat dinikmati oleh banyak orang pada akhirnya hanya dikuasai oleh ketua kelompok dengan para anggotanya adalah buruh tani di sawah milik ketua kelompok.

Variabel jumlah petani dalam fungsi produksi padi saat ini bisa jadi sudah bergeser kepada mekanisasi, namun mekanisasi memerlukan pembiayaan terutama untuk petani kecil. Dan pembiayaan yang fit dengan karakteristik petani kecil memerlukan rekayasa sosial ekonomi. Dengan konsep ini maka produksi padi masih bisa ditingkatkan. ***

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN

Title	Tilik Sawah Jokowi Optimistis Produktivitas Padi Meningkat	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Radar Semarang	
Page	3	
Author	Ria/fth	



TINJAU LOKASI BANTUAN : Presiden Joko Widodo saat mengecek pompa air bantuan dari Kementerian Pertanian di Dusun Bejirejo dan Dusun Beji Wetan, di Desa Kalibegi Kecamatan Tuntang.

MARIA NOVENA/JAWA POS RADAR SEMARANG

Tilik Sawah, Jokowi Optimistis Produktivitas Padi Meningkat

UNGARAN, Radar Semarang - Presiden Joko Widodo mendatangi persawahan di Dusun Bejirejo dan Dusun Beji Wetan, di Desa Kalibegi, Kecamatan Tuntang. Kedatangannya untuk melakukan pengecekan fungsi bantuan pompa air.

Presiden Joko Widodo mengatakan, rencananya ada 75 ribu pompa air yang dibangun. Saat ini sudah dibagikan 25 ribu pompa air. Satu pompa bisa mengairi persawahan diantaranya delapan sampai 18 petak (pk). "Di Jawa Tengah sendiri total sudah ada 4.300 pompa air yang didistribusikan. Kita harapkan pro-

duktivitas panen dari petani bisa naik hingga 1,3 juta ton," ujarnya.

Jika sekarang jumlah produktivitas mencapai 8,9 juta ton, ditambah 1,3 juta ton dari target program pompa-nisasi akan semakin naik hasil panen beras yang didapatkan petani di Jawa Tengah. "Di Kabupaten Semarang dengan satu pompa air maka bisa mengairi setidaknya 77 hektare (Ha) lahan persawahan," tambahnya.

Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang Edy Sukarno mengatakan, bantuan alsintan sangat membantu. Karena ada sawah tadah hujan yang ketika

kemarau tidak bisa produktif.

"Pompa air sangat membantu, dan airnya mengambil dari sungai Bere. Harapan kami bisa ke lahan yang luas 23 hektar," ujarnya.

Untuk mengairi sawah tadah hujan tersebut memerlukan pipa hingga 700 meter. Di Kabupaten Semarang ada 23 hektar lahan sawah 6.000 hektar diantara lahan tadah hujan. Ia mengatakan di Kabupaten Semarang mendapatkan 26 pompa bantuan. "Tentu harapan kami setelah ada pompa air yang semula sawah tadah hujan hanya tanam sekali setahun ini bisa dua kali," tambahnya. (ria/fth)

Tittle	Ustad Abdul Somad Bakal Hadir di MIF 2024	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Tribun Timur	
Page	5	
Author	Fqh	

Ustad Abdul Somad Bakal Hadir di MIF 2024

● Digelar MUI dan Muhammadiyah Sulse

MAKASSAR, TRIBUN - Makassar Islamic Fair (MIF) 2024 segera digelar. Pameran terbesar dan terlama di Sulawesi Selatan (Sulse) ini diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulse bersama Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulse.

Rencananya MIF 2024 akan digelar di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) mulai 31 Juli hingga 18 Agustus 2024.

Dukungan penuh pun mengalir dari Ketua MUI Sulse Prof AGH Najmuddin dan Ketua PW Muhammadiyah Sulse Prof Ambo Asse dalam konferensi pers yang digelar Panitia MIF di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulse, Jl Perintis Kemerdekaan, Rabu (19/6/2024).

Ketua Panitia MIF 2024, Prof Mustari Bosra mengungkapkan pameran ini jadi wadah pemantik geliat ekonomi syariah di Sulse. Tidak hanya itu, MIF 2024 turut menawarkan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan.

"Kami ingin memperkuat

ukhuwah Islamiyah melalui acara ini. Kita harap ada kegiatan dakwah dan tabligh. Kita sementara usaha datangkan Muballigh yang diminati generasi millenial," ujar Prof Mustari Bosra.

MIF 2024 akan dimekarkan ceramah dari dai kondang seperti Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Sebagai event ekonomi dan bisnis syariah, MIF 2024 dikorong mampu memantik pertumbuhan sektor ini di Sulse khususnya.

Selain itu, berbagai kegiatan seperti tabligh akbar, pameran, workshop, seminar, hingga kompetisi anak-anak akan menjadi bagian dari kemeriahan MIF 2024.

Event ekonomi syariah ini akan menggandeng 200 tenant perusahaan nasional. Sementara untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ada 300 tenant yang disediakan. MIF 2024 pun membuka pintu lebar bagi partisipasi dunia usaha. (fgh)

ANEKA PILIHAN STAND DI MUI EXPO

- Area A 5x5 meter untuk akomodatif dan bank & finance syariah mulai Rp 10 juta khusus space hingga Rp 16 juta jika include tenda.
- Area B dengan ukuran 5x5 untuk muslimah fashion, beauty, cosmetics, shoes, baby day care, kids fashion, education, dan bank serta finance syariah mulai Rp 7 juta hanya space hingga Rp 13 juta space & tenda.
- Area C ukuran 5x5 meter untuk fashion khitan, man care, shoes & cafe, sport & health, electronics, education, dan bank & finance syariah mulai Rp 6 juta hanya space hingga Rp 11 juta space & tenda.
- Area D1, D2, D3 luas 4x4 meter untuk berbagai kategori produk, mulai Rp 7 juta hanya space hingga Rp 12 juta space & booth.
- Area E1 dan E2 berukuran 3x3 meter untuk UMKM harga Rp 3 juta (hanya space) hingga Rp 7 juta (space & tenda).
- Exclusive Zona A, B, C untuk pemesanan space khusus dengan harga Rp 25 juta.
- Informasi lebih lanjut mengenai harga dan pendaftaran dapat diperoleh melalui 0812-8038-2881 atau 0853-4366-1505.



KONFERENSI PERS - Ketua MUI Sulse Prof AG Najmuddin bersama Ketua PW Muhammadiyah Sulse Prof Ambo Asse dalam konferensi pers Makassar Islamic Fair 2024 di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulse, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (19/6/2024). Pameran terbesar dan terlama di Sulawesi Selatan (Sulse) ini akan digelar di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) mulai 31 Juli hingga 18 Agustus 2024 dan dihadiri 4 menteri Kabinet Indonesia Maju juga dijadwalkan hadir, seperti Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Title	Diskumindag Sukabumi Berikan Pelatihan Pengolahan Pangan Bagi Wirausaha Baru	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Arya	

Diskumindag Sukabumi Berikan Pelatihan Pengolahan Pangan Bagi Wirausaha Baru

NERACA

Sukabumi - Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, menggelar pelatihan Vokasi Pengolahan Pangan Angkatan II bagi wirausaha baru.

Kegiatan yang bertujuan untuk mendukung program prioritas pembangunan berkelanjutan, yang fokus pada sektor jasa dan perdagangan, di buka langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Rabu (19/6).

"Pemda terus berusaha mengembangkan potensi ekonomi melalui kegiatan peningkatan pelaku usaha, termasuk SDM sebagai kunci sukses dalam kehidupan,"

ujar Kusmana. Kusmana mengatakan, pelatihan ini sejalan dengan program prioritas pembangunan Kota Sukabumi, yang fokus pada sektor jasa.

Untuk itu, Kusmana berharap, kegiatan ini benar-benar dapat meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha baru, mewujudkan pelaku usaha naik kelas, dan mampu bersaing di pasar domestik.

"Silakan implementasikan ilmu yang didapat dari pelatihan ini," pesan Kusmana.

Kusmana juga menyinggung masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM, salah satunya akses pasar dan modal. Untuk itu, aku Kusmana pemda mendorong peserta untuk mening-

katkan akses pasar melalui komunikasi dengan temu bisnis.

"Dalam praktik usaha, catat setiap transaksi agar terkontrol, terutama dalam hal perputaran uang.

Awali usaha dengan berpikiran positif, berani memulai, harus memiliki visi yang jelas, berorientasi kepada pelanggan, siap berkembang, dan rasional," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Diskumindag Kota Sukabumi, Agus Wawan Gunawan, mengungkapkan, pelatihan ini sebagai bentuk mendorong para pelaku wirausaha baru, agar mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, sehingga mampu bersaing di pasar dan berkon-

tribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

"Jadi pelatihan Angkatan ke II ini, diikuti oleh 50 peserta yang antusias ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang pengolahan pangan," jelasnya.

Selain itu juga, sambung Agus, kegiatan ini juga merupakan salah satu model pengembangan UMKM dan kewirausahaan masyarakat yang dilakukan melalui praktik langsung.

"Pelatihan ini, salah satu model dalam mengembangkan para UMKM dan kewirausahaan rakyat.

Dengan harapan mereka juga nantinya bisa naik kelas dan bisa bersaing," pungkasnya. ●arya

Tittle	Pemkot Tangsel Gandeng BI Hingga BPS Pantau Harga Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

ANTISIPASI INFLASI

Pemkot Tangsel Gandeng BI Hingga BPS Pantau Harga Pangan

NERACA

Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemantauan harga pangan di pasar tradisional selama hari raya Idul Adha agar tidak ada lonjakan inflasi.

Sekretaris Daerah Tangsel, Bambang Noertjahjo di Tangerang, Senin (17/6) mengatakan ada kenaikan harga karena meningkatnya permintaan barang pada momentum hari besar.

Tetapi untuk ketersediaan barang di pasar tradisional dan modern dalam kondisi aman dan terpenuhi. Hanya saja perlu dilakukan pemantauan agar tidak berdampak pada lonjakan inflasi.

"Kita lakukan pemantauan bersama BI dan BPS untuk menjaga agar tak ada inflasi. Hasil laporan di lapangan semua dalam kondisi terkendali," kata dia dalam keterangannya.

Selain itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan Bulog dalam menjaga ketersediaan beras dan menekan tak adanya kenaikan harga. Hal serupa juga dilakukan dengan produsen lain dalam menjaga ketersediaan komoditi.

"Upaya yang kita lakukan ini untuk menjaga harga pangan di pasar agar tak ada kenaikan yang signifikan dan semuanya bisa dikatakan terkendali," katanya.

Sementara untuk di Kota Tangerang, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kota Tangerang Suli Rosadi mengungkapkan berdasarkan hasil monitoring perkembangan harga kebutuhan pangan pokok secara rutin di pasar tradisional, saat ini masih dalam kategori stabil.

Kemudian masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian dalam jumlah berlebihan yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga barang. ● ant

Title	Perbedaan Data Jadi Tantangan Utama Industri Sawit	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Ant/gro	

Perbedaan Data Jadi Tantangan Utama Industri Sawit

NERACA

Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan, perbedaan data dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) maupun asosiasi menjadi tantangan utama yang dihadapi industri kelapa sawit Indonesia.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS Kabul Wijayanto menilai, belum adanya 'satu data' terkait luas lahan perkebunan kelapa sawit, jumlah produksi, sampai dengan jumlah petani kelapa sawit Indonesia turut menghambat pengembangan industri kelapa sawit. Sebagai salah satu

contoh, Kabul menyoroti perbedaan data antara Buku Statistik Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2021-2023, dengan data luas lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 833/KPTS/SR.020/M/12/2019.

"Kalau saya coba merujuk pada data statistik perkebunan, itu tahun 2019 sudah keluar (data) dari Kementerian Pertanian yang 16,38 juta (hektare). Tapi di data statistik (Ditjen Perkebunan) itu tidak ada pak, tahu-tahu di tahun 2021 sampai 2023 berubah menjadi 16,83 juta hektare, dan ditambahkan dengan ada luas yang harus dikonfirmasi, ini PR," kata Kabul

mengutip laman Antara.

Menurut Kabul, hal yang sama juga terjadi di tingkat Dinas Perkebunan masing-masing daerah.

Pemadanan data masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah agar dapat mengembangkan industri kelapa sawit.

Di samping perlunya pemadanan data, Kabul mengatakan bahwa industri kelapa sawit Indonesia masih mempunyai potensi besar untuk meningkatkan produktivitasnya.

Menurut data statistik dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), luas lahan perke-

bunan kelapa sawit yang dimiliki oleh petani rakyat mencapai 6,04 juta hektare dengan 2,5 juta petani rakyat. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 142 ribu petani ikut serta dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan jumlah tersebut bertambah menjadi 151 ribu pada Mei 2024.

Hal ini menurut Kabul, menunjukkan adanya peluang yang signifikan untuk peningkatan produktivitas. Artinya dengan memanfaatkan potensi ini, peningkatan produktivitas dari sisi petani masih sangat mungkin dicapai. ● ant/gro

Title	Petani Cabai Kulonprogo Raup Rp2 Miliar per Hari	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Harian Jogja	
Page	8	
Author	Triyo Handoko	

▶ PRODUKSI PERTANIAN

Petani Cabai Kulonprogo Raup Rp2 Miliar per Hari

PANJATAN—Memasuki panen raya, petani cabai di pesisir selatan Kulonprogo meraup untung hingga Rp2 miliar per hari. Dalam sehari, cabai yang berhasil dilelang mencapai 50 ton.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

- ▶ Bahkan pada awal Juni 2024, harga cabai mencapai Rp49.000 per kilogram, sedangkan paling rendah Rp14.000 per kilogram pada Sabtu (15/6).
- ▶ Salah satu strategi untuk mendongkrak harga yakni kekompakan dari seluruh kelompok tani yang ada di pesisir Kulonprogo.

Ketua Champion Cabai Kulonprogo, Sukarman, menyatakan dalam lelang yang digelar petani pesisir selatan Kulonprogo, harga cabai rata-rata mencapai Rp38.000 per kilogram. Bahkan pada awal Juni 2024, harga cabai mencapai Rp49.000 per kilogram, sedangkan paling rendah Rp14.000 per kilogram pada Sabtu (15/6). Menurut Sukarman, jenis cabai yang tengah dipanen kebanyakan cabai keriting hijau dan merah. Cabai rawit hanya sekitar 10% dari total hasil panen. Catatan terbaru paguyuban kelompok tani pesisir selatan Kulonprogo menunjukkan harga cabai rata-rata Rp19.000 pada Selasa (18/6), dengan jumlah total cabai yang

dilelang mencapai 53,7 ton. Dari 53,7 ton cabai itu, para petani mendapatkan Rp828,3 juta. Dijelaskan Sukarman, saat ini petani cabai di Kulonprogo bermitra dengan Kementerian Pertanian untuk menyuplai kebutuhan cabai secara nasional. Sebelumnya, ada permainan tengkulak yang menyebabkan harga cabai merosot. Permainan tengkulak cabai untuk menurunkan harga itu dimulai menjelang Iduladha kemarin. "Tujuannya agar harga cabai turun, agar tengkulak dapat untung lebih, dan hal ini biasa dan pernah kami alami sebelumnya," katanya, Rabu (19/6). Petani dari Kapanewon Panjatan

ini menjelaskan para petani yang saling berhimpun sudah memiliki cara mengatasi permainan tengkulak. "Sekarang harganya sudah naik lagi dari sebelumnya Rp14.000 per kilogram, sekarang sudah naik menjadi Rp19.000 per kilogram," katanya. Sukarman menerangkan, salah satu strategi untuk mendongkrak harga yakni kekompakan dari seluruh kelompok tani yang ada di pesisir Kulonprogo. Total ada 15 kelompok tani yang tersebar dari ujung timur Bumi Binangun di Kapanewon Galur hingga ujung barat di Kapanewon Wates dan Temon. "Kalau kami kompak, jangankan tengkulak yang selalu memainkan harga, hama dan penyakit tanaman juga bisa diatasi bersama, itu kuncinya," ujar Sukarman. Panen cabai pertama pada 2024 diprediksi berlangsung hingga awal Juli 2024. "Selanjutnya kami akan mulai menanam lagi pada Agustus untuk dipanen pada akhir 2024. Biasanya harganya jauh lebih baik hasil panen kedua daripada yang pertama seperti sekarang ini," kata Sukarman.

Tittle	Gunungkidul Segera Miliki Rumah Potong Hewan	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Harian Jogja	
Page	9	
Author	Andres Yuda Pramono	

► KEAMANAN PANGAN

Gunungkidul Segera Miliki Rumah Potong Hewan

WONOSARI—Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Gunungkidul telah mengirim proposal permohonan pembangunan rumah potong hewan (RPH) ke Pemerintah Pusat. RPH ini akan dibangun pada 2025.

Kepala DPKH Gunungkidul, Wibawanti Wulandari mengatakan dia telah mengajak Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian ke calon lokasi pembangunan RPH sebulan lalu di Semanu.

“Beliau sudah melihat kondisi lapangan. Waktu itu, beliau meminta kami untuk mengisi aplikasi e-proposal,” kata Wibawanti, Selasa (18/6). Wibawanti menambahkan jawatannya juga sudah mengirim proposal fisik ke Jakarta. DPKH Gunungkidul bersama Pemerintah DIY akan mengawal proses permohonan hingga tahap pembangunan.

DPKH menyerahkan pengalokasian dana tersebut ke Direktur Kesmavet apakah akan turun lewat Pemerintah DIY atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) langsung. Jika turun lewat Pemkab, maka bentuknya berupa dana alokasi khusus (DAK). Jika lewat provinsi, maka bantuan dana tugas pembantuan.

Pembangunan RPH ditaksir menelan anggaran Rp8 miliar. Saat ini, DPKH fokus pada tercapainya pembangunan RPH. Setelah itu, apabila ada kesempatan, RPH akan diperluas.

Sebenarnya, permohonan pembangunan RPH telah diajukan sejak lama. Bahkan, ketika mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo datang ke Gunungkidul setahun lalu, DPKH telah menyampaikan perihal pembangunan RPH. “Kami diminta oleh Pak Menteri Pertanian waktu itu untuk membuat proposal. Ternyata beliau kemudian terjerat kasus. Sekarang kami berusaha lagi mengajukan dan proposal sudah sampai di Jakarta,” katanya.

Lebih jauh, Wibawanti menegaskan pemotongan ternak harus lewat RPH. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Amanat dalam UU itu adalah agar masyarakat mendapat daging yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH). Melalui RPH, daging ASUH dapat dipenuhi, karena ternak seperti sapi akan diperiksa terlebih dahulu oleh dokter hewan. Jika sapi ternyata dalam kondisi sakit, maka RPH tidak akan menyembelinya.

Menurut Wibawanti, RPH juga menjadi salah satu keran pemasok pendapatan asli daerah (PAD). “Tetapi kami tidak berbicara untung dan rugi. Kami berbicara bagaimana negara hadir dalam memenuhi daging ASUH. Negara harus melayani,” ucapnya. (Andreas Yuda Pramono)

Title	Impor Beras Naik hingga 165%	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Harian Jogja	
Page	12	
Author	JIBI/Bisnis.com/Dwi Rachmawati	

► KEBUTUHAN PANGAN

Impor Beras Naik hingga 165%

JAKARTA—Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras pada periode Januari-Mei 2024 naik hingga 165,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Impor beras naik sebesar 165,27 persen dibandingkan Januari-Mei 2023,” ujar Deputy Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS), M. Habibullah, Rabu (19/6).

Menyitir data BPS, secara terperinci total volume impor beras selama periode Januari-Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton, naik 165,27% dibandingkan Januari-Mei 2023 sebanyak 854.290 ton. Adapun, impor beras terbanyak berasal dari Thailand sebanyak 918.901 ton.

Selanjutnya, negara lain yang memasok beras impor ke Indonesia pada periode tersebut yaitu Vietnam

sebanyak 624.741 ton; Pakistan 390.846 ton; India 58.215 ton; dan Kamboja sebanyak 25.000 ton. Sisanya sebanyak 248.461 ton beras diimpor dari sejumlah negara lain.

Sementara itu, nilai yang tercatat untuk impor beras sebanyak 2,26 juta ton pada periode Januari-Mei 2024 tercatat mencapai US\$1,44 miliar (sekitar Rp23,56 triliun).

Nilai impor beras pada periode tersebut naik 224,26% dibandingkan Januari-Mei 2023 sekitar US\$446,6 juta (sekitar Rp7,31 triliun).

Habibullah menambahkan, impor komoditas pangan lainnya pada periode Januari-Mei 2024 seperti bawang putih turun 2,42% dibandingkan Januari-Mei 2023; gula naik 0,66% dibandingkan Januari-Mei 2023; impor daging sejenis lembu turun 48,36% dibandingkan Januari-Mei

2023; dan impor komoditas gandum naik sebesar 35,31% dibandingkan Januari-Mei 2023.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyebut adanya risiko kekurangan produksi beras tahun ini hingga 5 juta ton. Arief memproyeksikan produksi beras pada semester II/2024 akan anjlok.

Prediksi itu seiring adanya defisit produksi beras periode Januari-Juli 2024 sebesar 2,6 juta ton. “Kalau diskusi saya dengan Pak Menteri Pertanian memproyeksikan sekitar 5 juta ton [kekurangan produksi beras]. Dilihat dari grafik dan pattern di semester kedua memang agak berat produksinya,” ujar Arief.

Meski begitu, Arief belum bisa berspekulasi ihwal potensi tambahan kuota impor beras tahun ini.

Adapun, pemerintah sebelumnya telah menetapkan impor beras pada 2024 sebanyak 3,6 juta ton.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menyebut realisasi impor beras hingga saat ini sudah mencapai 2 juta ton dari penugasan 3,6 juta ton tahun ini. Sebagian besar beras impor didatangkan dari Vietnam, Thailand, sama Pakistan.

Menurut Bayu, untuk pengadaan beras impor, pihaknya tidak bisa menerapkan sistem *hedging* harga dengan para pemasok. Kendati begitu, dia memastikan telah menjalin komitmen untuk pengadaan beras impor melalui kontrak dengan pihak di negara sumber impor apabila sewaktu-waktu beras diperlukan. “Harga *market*, saya enggak bisa *hedging* aturannya enggak boleh.”

(JIBI/Bisnis.com/Dwi Rachmawati)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Tittle	Tak Ada Korban Judol Jadi Penerima Bansos	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Jateng Pos	
Page	1 Part 1	
Author	Muz	



IST/JATENGPOS

Tinjau PomP a: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) meninjau pompanisasi di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu (19/6).

Tak Ada Korban Judol Jadi Penerima Bansos

Jokowi Tinjau Bantuan Pompa

UNGARAN- Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal wacana korban judi online, yakni keluarga pelaku bisa

jadi penerima bantuan sosial. Jokowi menegaskan tidak ada program tersebut.

Hal tersebut sempat ditanyakan kepada Jokowi setelah meninjau bantuan program bantuan pompa air di Karanganyar, Rabu (19/6). Jokowi membantah wacana tersebut.

"Nggak ada," kata Jokowi singkat seperti

dilihat di YouTube Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, wacana keluarga pelaku judi online bisa jadi penerima bansos ini diungkap Menko PMK Muhadjir Effendy. Ia awalnya mengklarifikasi pemahaman publik atas pernyataannya mengenai 'korban judi online jadi penerima bansos'. Muhadjir menekankan bukan pelaku judi

online yang menerima bansos, melainkan keluarga pelaku yang menjadi korban.

Sementara itu, setelah meninjau bantuan program bantuan pompa air di Karanganyar, Jokowi didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulai-

■ Baca Tak ada hal 11

Tittle	Tak Ada Korban Judol Jadi Penerima Bansos	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Jateng Pos	
Page	1 Part 2	
Author	Muz	

Tak Ada

dari hal 1

man meninjau pompanisasi di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu (19/6) siang.

Hal ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan meteorologis pada musim kemarau sehingga membutuhkan kesiagaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Kita ingin mengantisipasi kemungkinan kekeringan dalam jangka panjang, yang akan dimulai, menurut BMKG, Juli, Agustus, September dan Oktober, sehingga ini bisa diantisipasi dengan pompa-

nisasi di semua Provinsi, agar produktivitas kita tidak turun" terang Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menyebut saat ini pemerintah tengah gencar mendistribusikan mesin pompa ke seluruh Indonesia, program ini ditujukan agar petani mampu berproduksi disepanjang musim dan target peningkatan produksi secara nasional tercapai. Khusus di Jawa Tengah, kata Presiden, diproyeksikan dapat meningkatkan hingga 1,3 juta ton.

"Kalau di Jawa Tengah, dari total 4.300 pompa, nanti kita harapkan produktivitas kita akan tambah 1,3 juta ton, dari total 8,9 juta ton ditambah 1,3 juta ton, sehingga produktivi-

tasnya naik, diseluruh Indonesia sudah dibagi 25.000, dari total rencana kira-kira 75.000 pompa" rincinya.

Program pompanisasi ini, lanjut Presiden Jokowi, dargetkan dapat mendukung aktivitas produksi petani dilapangan, untuk beberapa wilayah yang tadinya hanya dapat menanam satu kali dalam setahun, diharapkan dapat ditingkatkan menjadi dua atau tiga kali dalam setahun.

"Sebagai contoh disini, di Kabupaten Semarang, pompa satu ini bisa mengairi 77 hektar, yang sebelumnya ada yang panen satu kali nanti bisa menjadi dua kali, yang sudah disini tadi, dua kali bisa

menjadi tiga kali" ungkapnya.

Dik kesempatan yang sama, Mentan Andi Amran Sulaiman, menyebut pendistribusian mesin pompa secara nasional telah berjalan hingga 70-80%, pompa ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menekan impor beras dan mewujudkan ketahanan pangan secara nasional.

"Ini sudah berjalan 70-80% sudah terpasang, yang tahap pertama 25.000, berikutnya akan ada lagi, jadi kami target pompanisasi ini bisa meng-cover hingga 1 juta hektar, kalau ini bisa kita cover, kita pasti bisa meningkatkan produksi dan menekan impor" jelas Mentan Amran. (muz)

Titlle	Pompa Bantuan Kementan, Petani Kalibeji Panen Dua Kali	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Jateng Pos	
Page	3	
Author	Muz	

Pompa Bantuan Kementan, Petani Kalibeji Panen Dua Kali

UNGARAN - Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (Dispertanikap) Kabupaten Semarang Muh Edy Sukarno menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan pompanisasi untuk pengaliran sawah di Kabupaten Semarang dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Adanya bantuan pompa petani biasanya hanya merasakan panen padi sekali dalam setahun, setelah pompanisasi diharapkan dapat panen dua kali dalam setahun. Tidak hanya itu, berkat pengaliran modern bisa memperluas areal lahan tanam.

"Pompa bantuan Kementan ini 6 inci cukup besar kapasitasnya untuk pengaliran sawah. Seperti di Desa Kalibeji ini satu pompa bisa menjangkau areal sawah seluas 23 hektar. Bahkan jika dimaksimalkan bisa sampai seluas 25 hektar. Potensi di sini (Kalibeji) cukup bagus, ada kali Blere yang airnya selalu mengalir, setiap hari bisa dimanfaatkan untuk pengaliran," ujar Eddy Sukarno di sela-sela acara kunjungan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertanian Andi



FOTO: MUZ-JATENGPOS

BANTUAN POMPA: Kepala Dispertanikap Kabupaten Semarang Muh Edy Sukarno diwawancara wartawan di sela kunjungan Presiden Jokowi di Desa Kalibeji, Rabu (19/6).

Amran Sulaiman saat meninjau pompa bantuan Kementan di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu (19/6).

Pompa bantuan Kementan di Desa Kalibeji diberikan kepada kelompok tani (kelomtan) Ngudirejo dan Handayani, khususnya yang selama ini mengandalkan

tanam sawah tadah hujan. Kelomtan Ngudirejo memiliki lahan tadah hujan seluas 13 hektar, sedangkan kelomtan Handayani seluas 10 hektar.

"Sekarang dengan sistem pompanisasi sawah tadah hujan tidak lagi memasuki masa tanam hanya saat musim hujan, musim kemarau tetap bisa bertanam berkat pengaliran menggunakan

pompa," jelasnya.

Potensi hasil panen dipastikan bakal meningkat begitu juga dengan pendapatan petani setempat. Estimasi peningkatan hasil panen bisa dirasakan petani Kalibeji per hektar sawah rata-rata hasil panen sebanyak 6,5 ton hingga 7,8 ton maka bisa meningkat 2 kali lipat.

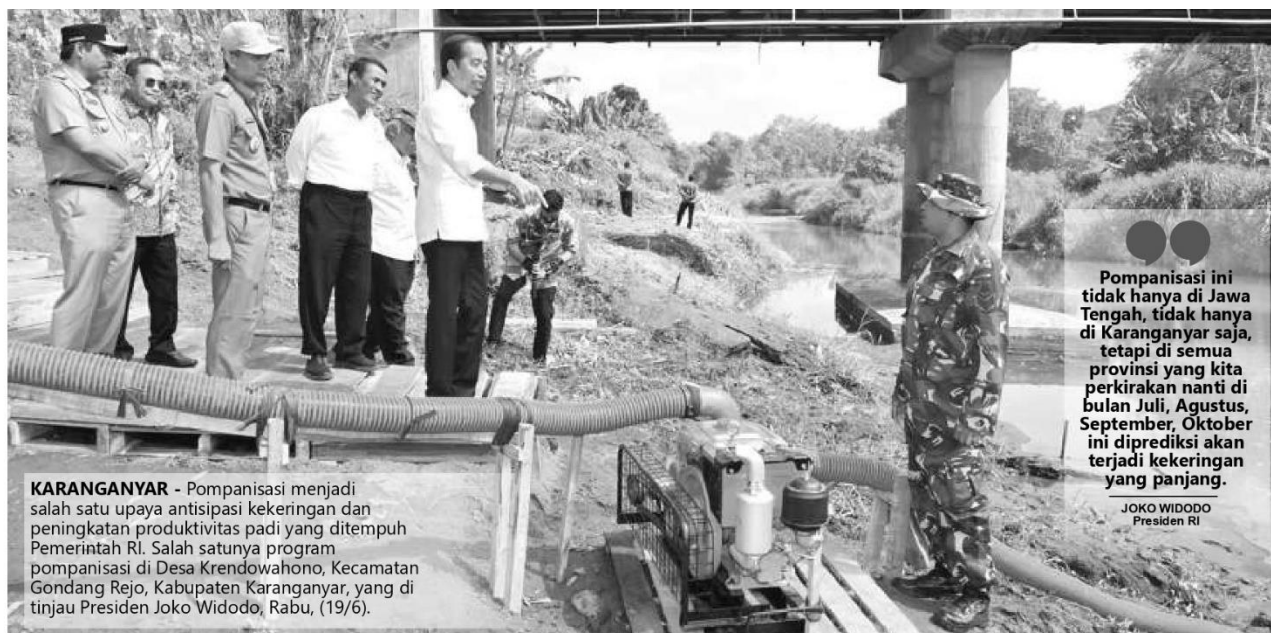
Dalam kesempatan ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebutkan pendistribusian mesin pompa secara nasional telah berjalan hingga 70 - 80 %, pompa ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menekan impor beras dan mewujudkan ketahanan pangan secara nasional.

"Seperti di Kabupaten Semarang satu pompa bisa mengairi 77 hektar, yang sebelumnya hanya satu kali panen sekarang bisa dua kali panen bahkan lebih," ujarnya.

Bantuan pompanisasi di Kabupaten Semarang tahun ini berjumlah 47 unit, dengan potensi luas sawah tadah hujan di Kabupaten Semarang seluas 5.318 ha. Pompanisasi berpotensi meningkatkan produksi sebesar 26.590 ton atau naik 18,64 % dari tahun 2023.

Selain bantuan pompa, Kabupaten Semarang tercatat mendapat bantuan alat mesin pertanian lain berupa traktor roda 4 sejumlah 1 unit senilai Rp. 3,8 M. 3. Bantuan traktor roda 2 sejumlah 31 unit. (muz)

Title	Presiden Tinjau Pompanisasi di Karanganyar dan Klaten	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Jateng Pos	
Page	9	
Author	Dea/rit	



KARANGANYAR - Pompanisasi menjadi salah satu upaya antisipasi kekeringan dan peningkatan produktivitas padi yang ditempuh Pemerintah RI. Salah satunya program pompanisasi di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, yang di tinjau Presiden Joko Widodo, Rabu, (19/6).

Pompanisasi ini tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Karanganyar saja, tetapi di semua provinsi yang kita perkirakan nanti di bulan Juli, Agustus, September, Oktober ini diprediksi akan terjadi kekeringan yang panjang.

JOKO WIDODO
Presiden RI

MENINJAU : Presiden tinjau pompanisasi di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

MUCHLIS JR. - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Tinjau Pompanisasi di Karanganyar dan Klaten

"Pompanisasi ini tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Karanganyar saja, tetapi di semua provinsi yang kita perkirakan nanti di bulan Juli, Agustus, September, Oktober ini diprediksi akan terjadi kekeringan yang panjang," ujar Presiden Jokowi.

Dengan adanya bantuan pompa air, Presiden Jokowi menargetkan peningkatan produksi padi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,3 juta ton. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, pemerintah menyalurkan 4.300 pompa air yang

tersebar di 35 kabupaten/kota.

"Di Jawa Tengah sudah didatangkan pompa, sudah diterima di provinsi, di Kodam, itu 4.300 pompa, baik yang PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK seperti yang ada di sini," imbuhnya.

Proyek pompanisasi ini melibatkan pengambilan air dari sungai dan air tanah untuk mendukung irigasi di musim kering. Presiden juga menyatakan bahwa hujan buatan akan dimaksimalkan di akhir musim hujan untuk mendukung upaya ini.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta bupati setempat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memberikan penjelasan mendalam tentang strategi pemerintah untuk mengatasi dampak El Nino dan kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung lebih awal.

Menurutnya, pompanisasi merupakan langkah konkret yang cepat dalam memitigasi dampak kekeringan. "Kenapa kita pasang pompa air? Karena ini adalah solusi cepat. Hari ini kita pompa, hari ini kita bisa tanam karena kalau kita cetak sawah itu butuh waktu," ujar Menteri Pertanian.

Menteri Pertanian melanjutkan, upaya ini diharapkan tidak hanya akan mengatasi kekurangan pasokan air di musim kering, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman, se-

hingga membantu meningkatkan kesejahteraan para petani.

Pemerintah menargetkan pompanisasi ini dapat menjangkau 1 juta hektare lahan pertanian dan berencana untuk mencetak sawah baru seluas 1 juta hektare per tahun sebagai strategi jangka panjang. Ini merupakan bagian dari usaha besar untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia di masa depan. "Harapan kita ke depan, mari kita sinergi, mari kita kolaborasi untuk negeri yang kita

cintai. Karena mimpi besar kita adalah mencukupi beras dalam negeri, bahkan syukur-syukur ke depan bisa kita memberi, membantu saudara-saudara kita yang kelaparan kepada negara lain," tutup Menteri Pertanian.

Selain meninjau pompanisasi di Kabupaten Karanganyar, Presiden Jokowi juga meninjau proyek serupa di Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten serta Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang (dea/rit)

Title	Pemprov Petakan Daerah Rawan Kekeringan	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Tangsel Pos	
Page	6	
Author	Rus/rie/bnn	

Pemprov Petakan Daerah Rawan Kekeringan

SERANG-Pemprov tengah melakukan pemetaan daerah mana saja yang memiliki potensi kekeringan pada tahun ini.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Nana Suryana kemarin mengaku sudah mempunyai pengalaman tahun lalu, bagaimana menangani bencana kekeringan. Saat itu beberapa bulan wilayah Banten mengalami kekeringan yang disebabkan el nino.

"Pada tahun ini, penanganan kekeringan kami upayakan tidak akan terjadi kelambatan seperti yang pernah terjadi pada tahun lalu," katanya.

Selain itu, pihaknya telah melakukan pemetaan dengan melihat daerah-daerah yang tahun kemarin mengalami kek-

eringan. Berdasarkan catatan BPBD Banten, pada 2023 lalu, bencana kekeringan terjadi di 58 kecamatan di Provinsi Banten. Kecamatan paling banyak dan paling parah mengalami kekeringan ada di Kabupaten Lebak.

"Terkait informasi dari peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, kita sudah antisipasi dan udah pengalaman di tahun lalu. Jadi kita sudah menempatkan beberapa sektor sehingga kita bisa lebih cepat penanganannya dan tidak terjadi keterlambatan seperti tahun kemarin," jelas Nana.

Sebelumnya, Dinas Pertanian (Distan) Banten merilis, puluhan kecamatan yang tersebar di lima kabupaten/kota se-Banten masuk dalam klasifikasi daerah sangat rawan

dan rawan kekeringan.

Data pada Distan menyebutkan, selain sangat rawan, rawan puluhan kecamatan lainnya di Provinsi Banten berpotensi alami kekeringan, dan hanya 18 kecamatan dinyatakan aman.

Data tersebut, berdasarkan hasil analisa dengan membuat rata-rata kerusakan tanaman padi akibat kekeringan dari tahun 2006 sampai dengan 2023.

Adapun klasifikasi beberapa wilayah sangat rawan, rawan, potensial atau aman. Klasifikasi daerah sangat rawan kekeringan ada di Kabupaten Pandeglang yang tersebar di Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cikeusik, Cigeulis, Panimbang, Munjul, Sindangresmi, Pagelaran dan Sukaresmi.

Di Kabupaten Lebak me-

nyebar di Kecamatan Malimping dan Wanasalam. Kabupaten Tangerang di Kecamatan Kronji dan Mekarbaru. Dan Kabupaten Serang berada di Kecamatan Carenang. Kota Serang di Kecamatan kasemen.

Sedangkan daerah rawan kekeringan adalah di Kabupaten Pandeglang menyebar di Kecamatan Cibaliung, Cibitung, Bojong, Angsana dan Bojong. Kabupaten Lebak di Kecamatan Panggarangan, Banjarsari, Bojongmanik, Cirinten, Leuwidamar, Cipanas, Sajira, Cikurur, Kalanganyar dan Maja. Kabupaten Tangerang di Kecamatan Solear, Tigaraksa, Jambe, Sindangjaya, Jayanti, Kresek, Gunung Kaler, Mauk dan Teluknaga.

Sementara daerah rawan kekeringan di Kabupaten Serang terdapat di Kecamatan Petir, Tunjungteja, Cikeusal, Pamarayan, Bandung, Jawilan, Kopo, Cikande, Kramatwatu, Ciruas, Pontang, Lebakwangi, Binuang, Tirtayasa dan Tanara. Kota Serang di Walantaka dan Taktakan.(rus/rie/bnn)

Tittle	Produksi Anjlok Impor Beras Melonjak	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Solopos	
Page	1 Part 1	
Author	Dwi Rachmawati	

Produksi Anjlok, Impor Beras Melonjak

DWI RACHMAWATI

JAKARTA—Produksi beras nasional anjlok sepanjang 2023. Fakta ini sejalan dengan lonjakan impor beras Indonesia hingga pertengahan 2024. Masalah pupuk bersubsidi dianggap salah satu biang keladinya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras pada periode Januari–Mei 2024 naik 165,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Impor beras naik sebesar 165,27% dibandingkan Januari–Mei 2023,” ujar Deputy Bidang Statistik Produksi, BPS, M. Habibullah, Rabu (19/6/2024).

Berdasarkan data BPS, total volume impor beras selama periode Januari–Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton. Jumlah itu naik 165,27% alias lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari–Mei 2023 sebanyak 854.290 ton.

Impor beras terbanyak berasal dari Thailand sebanyak 918.901 ton. Negara lain yang memasok beras impor ke Indonesia pada periode tersebut adalah Vietnam sebanyak 624.741 ton, Pakistan 390.846 ton, India 58.215 ton, dan Kamboja sebanyak 25.000 ton. Sisanya sebanyak 248.461 ton beras diimpor dari negara-negara lainnya.

BERSAMBUNG KE HAL. 11



Elsan/Indah Septianing Wicandari

Presiden Joko Widodo berswafoto bersama petani saat meninjau panen padi dan pemasangan pompa di Dusun Sangiran, Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Rabu (19/6/2024). Program bantuan pompa air untuk pertanian ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

Title	Produksi Anjlok Impor Beras Melonjak	 Kementerian Pertanian
Date	20 Juni 2024	
Media	Solopos	
Page	1 Part 2	
Author	Dwi Rachmawati	

Produksi Anjlok, Impor Beras Melonjak

[Sambungan dari hal 1]

Beras 2,26 juta ton yang diimpor pada periode Januari–Mei 2024 itu senilai US\$1,44 miliar atau sekitar Rp23,56 triliun. Nilai impor beras pada periode tersebut naik 224,26% dibandingkan periode Januari–Mei 2023 sekitar US\$446,6 juta.

Secara terperinci, nilai impor beras Indonesia dari Thailand sepanjang Januari–Mei 2024 mencapai US\$597,63 juta; impor beras dari Vietnam senilai US\$402,54 juta; dan nilai impor beras dari Pakistan sebesar US\$245,9 juta. Sedangkan impor beras dari India senilai US\$29,89 juta; dan impor beras dari Kamboja senilai US\$16,25 juta.

Habibullah menyampaikan pergerakan impor komoditas pangan lainnya pada periode Januari–Mei 2024. Impor bawang putih turun 2,42% dibandingkan Januari–Mei 2023, impor gula naik 0,66% dibandingkan Januari–Mei 2023, impor daging sejenis lembu turun 48,36% dibandingkan Januari–Mei 2023, dan impor gandum naik 35,31% dibandingkan Januari–Mei 2023.

Sementara itu, data BPS mencatat produksi beras pada 2023

sebanyak 31,1 juta ton turun 440.000 ton dibandingkan tahun lalu. Produksi beras pada 2022 mencapai 31,54 juta ton.

Kementerian Pertanian (Kementan) blak-blakan menyebut bias kerok produksi beras nasional anjlok pada 2023. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Prihasto Setyanto, mengatakan penurunan produksi beras pada tahun lalu salah satunya disebabkan persoalan pupuk bersubsidi.

Selain volume pupuk subsidi yang terbatas, aksesibilitas terhadap pupuk subsidi menjadi penyebab lainnya. Prihasto menyebut ada sekitar 17% hingga 20% (seperlima) petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi. Di sisi lain, ada 30 juta petani masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk subsidi.

“Penurunan produksi beras pada 2023 sebesar 0,44 juta ton, salah satu penyebabnya terkait dengan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap pupuk bersubsidi,” ujar Prihasto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Rabu.

Dia membeberkan sejumlah upaya telah dilakukan Kementan

mengatasi persoalan pupuk subsidi. Di antaranya mengabulkan penambahan alokasi subsidi pupuk dari 4,73 juta ton pada 2023 menjadi 9,55 juta ton pada 2024. Jumlah petani penerima mencapai 14,2 juta orang.

Prihasto mengklaim revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 10/2022 menjadi Permentan No. 1/2024 menjadi solusi tata kelola pupuk yang lebih baik. Dalam beleid teranyar itu, Kementan menambahkan pupuk organik ke dalam jenis pupuk bersubsidi bersama urea, NPK, dan NPK khusus.

Dalam aturan terbaru itu, petani harus tergabung dalam kelompok tani (poktan) dan terdaftar dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Datanya bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Pendanaan petani penerima pupuk kini dievaluasi setiap empat bulan sekali dari sebelumnya hanya satu kali setahun. Alokasi pupuk bersubsidi juga diperinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan sebaran wilayah.

Penetapan alokasi e-RDKK dan perincian alokasi per wilayah

dengan mempertimbangkan luas baku sawah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Jenis komoditas yang berhak mendapat pupuk bersubsidi meliputi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

“Penebusan pupuk subsidi sekarang dapat menggunakan KTP atau Kartu Tani,” tuturnya. Kementan juga menyebut penurunan produksi beras dipicu anggaran belanja yang turun, bibit unggul yang berkurang, alat dan mesin pertanian (alsintan) yang sudah tua atau memasuki umur teknis, dan kekeringan akibat El Nino. Selain itu, 60% saluran irigasi perlu direhabilitasi dan kurangnya ketersediaan petugas penyuluh pertanian (PPL) atau hanya 50% dari jumlah yang diperlukan.

Pompanisasi

Rabu (19/6/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Kunjungan Jokowi ke desa yang berbatasan dengan Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, itu adalah untuk mengecek pompanisasi

lahan pertanian.

Jokowi tiba sekitar pukul 08.30 WIB bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan sejumlah pejabat lainnya.

Setelah mengecek pompa air di tepi Sungai Dengkeng, Jokowi bergeser ke area pertanian. Di tempat itu, Presiden sempat berbincang dengan petani serta mengecek saluran irigasi. Kunjungan Jokowi ke Tumpukan berlangsung sekitar 30 menit dan bergeser ke Kabupaten Karanganyar.

Sementara itu, Amran Sulaiman menjelaskan saat ini terjadi El Nino bersamaan dengan musim kemarau. Kondisi itu dikhawatirkan mengancam produktivitas padi. “Dua kondisi ini sangat mengkhawatirkan kami. Solusi tercepat adalah pompanisasi, tidak ada solusi lain,” kata Mentan.

Pompanisasi dimaksudkan agar proses tanam bisa cepat serta meningkatkan indeks pertanaman dari yang sebelumnya satu kali tanam dalam setahun bisa dua kali atau dari sebelumnya dua kali tanam bisa jadi tiga kali.

“Potensi [lahan pertanian] di Jateng [Jawa Tengah] 267.000 ha. Kalau indeks pertanaman dinaikkan 1-1,5, bisa panen 500.000 ha.

Kemudian dikalikan 6 ton jadi 3 juta ton gabah artinya setara tambahan 2 juta ton beras. Artinya bisa menutup impor 50 persen,” kata Mentan.

Di Karanganyar, Presiden Jokowi bicara soal produksi padi di Jawa Tengah yang ditarget meningkat 1,3 juta ton dari target semula 9,8 juta ton pada tahun ini. Target produksi padi ditingkatkan seiring bantuan pompanisasi dari pemerintah. Di Jawa Tengah, Presiden mengatakan telah menyalurkan 4.300 unit bantuan pompa air.

“Pompanisasi tidak hanya di Jateng atau di Karanganyar saja. Tapi di semua provinsi,” kata Jokowi di Dusun Sangiran, Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo.

Jokowi mengatakan pada Juli hingga Oktober wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami kekeringan panjang. Karena itu, katanya, pemerintah menyalurkan bantuan pompa guna mengatasi persoalan kekeringan tersebut.

“Di Jateng target kita 9,8 juta ton [produksi padi]. Dengan pompanisasi kita ingin ada tambahan 1,3 juta ton,” katanya. (Bisnis.com/Taufiq Sidik Prakoso/Indah Septyaning Wardani)